PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro - Blitar
Telp.(0342) 801201
B L I T A R

Blitar, 30 Maret 2022

Nomor : 118/276/409.05/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Penyampaian LPPD Kab. Blitar TA 2021.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur

Cq. Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Jatim

di

T E M P A T

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SETDA

Drs. IZUL MAROM, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hikmat dan hidayah-Nya, sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami berupa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang disampaikan kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan kerjasama semua stake holder, untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya. Demikian laporan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban kepala daerah yang mendapat kepercayaan dari segenap masyarakat di Kabupaten Blitar .

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seiring doa, semoga segala upaya kita dalam membangun Kabupaten Blitar senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamiin.

Blitar, Maret 2022

BUPATI BLITAR

BUPATI BLITAR

RINI SYARIFAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-2

1.1.1 Penjelasan Umum I-2

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah I-25

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal I-39

BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro II-1

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-13

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran II-14

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-72

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-76

BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan III-1

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi. III-4

3. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya.

BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan IV-2

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-3

4.1.2 Program dan Kegiatan IV-5

4.1.3 Permasalahan dan Solusi IV-7

4.2 Urusan Kesehatan IV-8
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-8
4.2.2 Program dan Kegiatan IV-13
4.2.3 Permasalahan dan Solusi IV-16

4.3 Urusan Pekerjaan Umum IV-17
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-17
4.3.2 Program dan Kegiatan IV-18
4.3.3 Permasalahan dan Solusi IV-20

4.4 Urusan Perumahan Rakyat IV-21
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-21
4.4.2 Program dan Kegiatan IV-22
4.4.3 Permasalahan dan Solusi IV-22

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV-23
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-23
4.4.2 Program dan Kegiatan IV-26
4.4.3 Permasalahan dan Solusi IV-27

4.6 Urusan Sosial IV-27
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-27
4.4.2 Program dan Kegiatan IV-32
4.4.3 Permasalahan dan Solusi IV-33

BAB V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD ini digunakan Pemerintah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPPD disusun berdasarkan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari proses kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka pemahaman terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah ini akan semakin jelas, baik dalam memahami kekurangan – kekuranganmaupun keberhasilan – keberhasilannya sertapemetaan langkah – langkahkedepan untuk perbaikan dan sekaligus peletakan pondasi yang kokoh untuk membangun Kabupaten Blitar di masa yang akan datang.

Guna mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Kepala Kepala Daerah agar sejalan dengan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala

Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahannya.

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati BlitarTahun 2019 meliputi :

1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Repubik Indonesia Nomor 2730);
2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

20) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
23) Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
24) Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

b. Data Geografis

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara $111^0$40'-$112^0$10' Bujur Timur dan $7^0$58' – $8^0$9'5'' Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km² dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Menurut penggunaan lahan, tegal/kebun dan sawah memiliki proporsi yang besar, basis perekonomian Kabupaten Blitar adalah pada sektor pertanian.

Tabel
Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Blitar Tahun 2021

Penggunaan Lahan	Persentase
Sawah	20,13
Tegal/Kebun	30,01
Ladang/Huma	0,02
Perkebunan	8,26
Hutan Rakyat	3,44
Padang Penggembalaan/Padang Rumput	0,01
Hutan Negara	5,32
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	26,51
Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll)	6,21
Sementara tidak diusahakan	0,08

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2021.

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegununga n berada di bagian utara dimana terdapat Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan.

Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar yan memiliki ketinggian wilayah ±167 meter sebagai berikut:

1) Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2) Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
3) Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Kabupaten Blitar memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 20º-34º C. Menurut klasifikasi *Schmidt-Ferguson*, Kabupaten Blitar termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah Kabupaten Blitar tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar.

Kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam, terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai dan pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi kabupaten yang memiliki ketinggian wilayah ±167 meter adalah sebagai berikut:

a. Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
b. Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Namun, bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
c. Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi disebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sungai Brantas ini juga sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti sungai Lekso, sungai Putih dan sebagainya. Dibagian selatan juga terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km menghadap Samudera Indonesia.

Sungai Brantas yang membelah Kabupaten Blitar dan Gunung kelud yang aktif sepanjang tahun memberikan dampak yang luar biasa pada kondisi tanah utamanya di kawasan Blitar Utara. Tanah pada kawasan tersebut mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi sehingga sangat cocok sebagai daerah pertanian tanaman pangan dan perkebunan seperti coklat, kopi dan cengkeh. Selain itu dengan aliran air yang mencukupi sepanjang tahun, di wilayah ini juga sesuai untuk budidaya perikanan, baik perikanan konsumsi maupun ikan hias yang salah satu jenisnya sangat terkenal dari Kabupaten Blitar yaitu ikan koi.

Sementara untuk Blitar sebelah Selatan termasuk daerah yang kurang subur karena merupakan daerah pegunungan batu dan kapur. Namun meskipun tanah di wilayah ini tidak subur, wilayah ini menyimpan potensi bahan tambang yang tinggi yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan struktur geologi, Kabupaten Blitar kaya akan jenis batuan, mulai dari satuan batu gamping dan satuan batuan

vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai diwilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian Utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah ±50% dari luas wilayah KabupatenBlitar.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang berbeda antara wilayah Utara dengan Selatan. Wilayah Utara Sungai Brantas membentuk pola aliran *(drainase system)* radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah berpusat pada Gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar dan bermuara di Sungai Brantas. Wilayah Selatan,sungai-sungai dan anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia dan hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara di Sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata <5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan Bakung.

Secara klimatologis, Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau

umumnya berlangsung antara bulan November – April. Sedangkan musim penghujan antara bulan Mei – September dengan curah hujan rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm/tahun.Dengansuhurata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4℃ dan28,3.Tempat disekitar pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebihtinggi.

Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupatan Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan,perbukitan,dandaratan.Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar Utara dengan ketinggian mencapai167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk berasal dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk morfologi perbukitan,berada pada wilayah Blitar bagian Selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter diatas permukaan air laut (dpl) hingga 350 meterdpl.Morfologitersebutumumnyaterbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20 persen sampai 40 persen, yang meliputi kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran, terletak di bagian Tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari Timur ke Barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar 20 persen, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagaian Kecamatan Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk dapat didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari

6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan permintaan barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kependudukan lainnya, terutama untuk menghadapi era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti yang terjadi pada saat ini.

Berikut disajikan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 beserta kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Blitar:

Tabel Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Blitar Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk Per km²
Bakung	27,34	111,24	246
Wonotirto	37,92	164,54	230
Panggungrejo	42,30	119,04	355
Wates	30,15	68,76	438
Binangun	45,86	76,79	597
Sutojayan	51,08	44,20	1.156
Kademangan	69,71	105,28	662
Kanigoro	81,77	55,55	1.472
Talun	65,42	49,78	1.314
Selopuro	43,90	39,29	1.117
Kesamben	53,03	56,96	931
Selorejo	38,62	52,23	739
Doko	40,70	70,95	574
Wlingi	53,72	66,36	810
Gandusari	73,24	88,23	830
Garum	68,31	54,56	1.252
Nglegok	74,81	92,56	808
Sanankulon	57,53	33,33	1.726

Ponggok	108,17	103,83	1.042
Srengat	67,72	53,98	1.254
Wonodadi	49,10	40,35	1.217
Udanawu	43,37	40,98	1.058
Jumlah	1.223,75	1.588,79	770

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 adalah sebanyak 1.223.745 jiwa (1.223,75 ribu). Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Ponggok yaitu 108,17 (ribu). Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar secara keseluruhan mencapai 770 jiwa/km2. Angka kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Sanankulon dengan angka kepadatan mencapai 1.726 jiwa/km2. Kecamatan Sanankulon memiliki jumlah penduduk sebanyak 57.530 (ribu) jiwa, dengan luas wilayah seluas 33,33 km2. Luas wilayah Kecamatan Sanankulon termasuk sangat kecil dibandingkan luas wilayah lainnya, hal ini membuat angka kepadatan penduduknya memiliki angka yang tinggi. Karena jumlah penduduk di Kecamatan Sanankulon yang tergolong cukup tinggi.

Selanjutnya terkait dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan jenis kelamin, dari total keseluruhan sebanyak 1.223,745 jiwa penduduk, terdiri dari 616.511 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 607.234 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Blitar berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,53.

Berikut disajikan piramida penduduk Kabupaten Blitar dilihat dari pengelompokkan umur dan perbandingannya berdasarkan jenis kelamin pada Tahun 2020 :

Gambar
Piramida Penduduk Tahun 2021

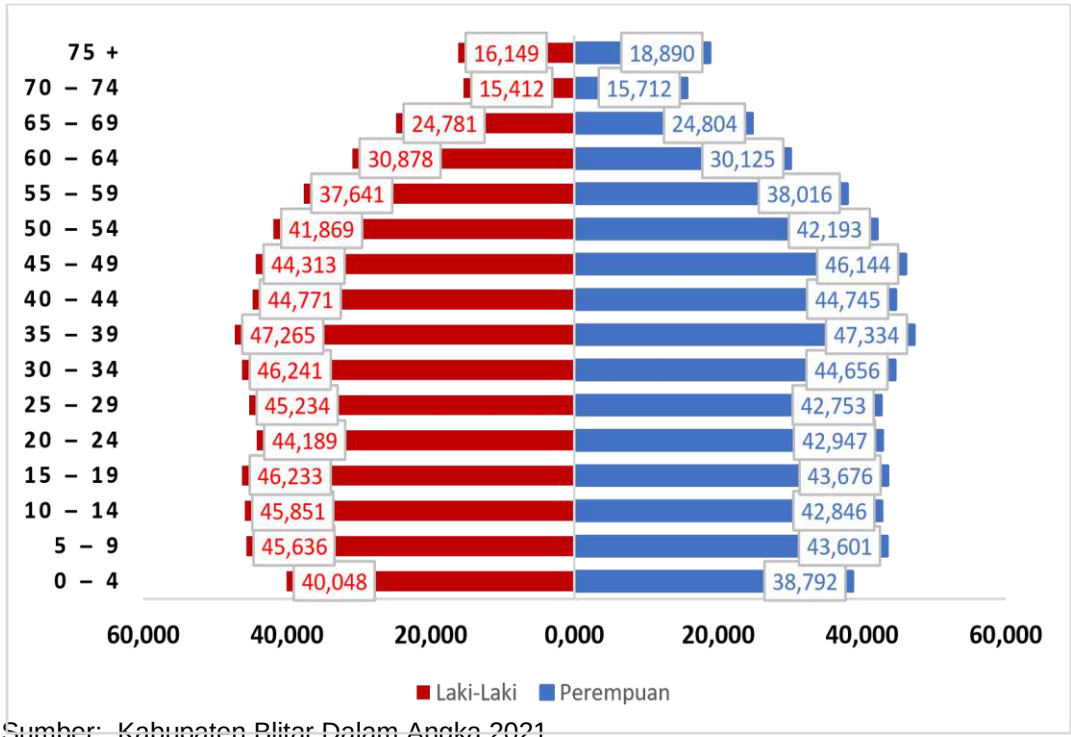

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2021

Piramida penduduk di atas menggambarkan komposisi penduduk di Kabupaten Blitar berdasarkan umur dan jenis kelamin. Maka dapat dilihat jika proporsi penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 35 tahun hingga 39 tahun. Jumlah penduduk laki-laki pada usia 35-39 tahun sebanyak 47.265 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan pada usia tersebut mencapai 47.334 jiwa. Jika dilihat, bentuk piramida di atas, cenderung mengerucut pada puncak, mulai kelompok umur 70 tahun ke atas, jika dibandingkan dengan dasar yang lebih lebar, yaitu umur 0 hingga 4 tahun.

Tingkat pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk-kenaikan alami (kelahiran, kematian).

Gambar
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2021

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2022.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.231.013 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,59 persen, terdiri dari laki-laki sejumlah 620.060 jiwa dan perempuan sejumlah 610.953 jiwa. Adapun pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,61%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,58%).

d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Tabel
Data Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun menurut Kecamatan se Kabupaten Blitar

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah	
			Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan
1	Bakung	111,24	11	32
2	Wonotirto	164,54	8	35
3	Panggungrejo	19,04	10	32
4	Wates	80,86	8	22
5	Binangun	59,66	12	33
6	Sutojayan	44,20	11	25
7	Kademangan	105,11	15	45
8	Kanigoro	55,55	12	38
9	Talun	49,78	14	39
10	Selopuro	39,29	8	26

11	Kesamben	59,66	10	36
12	Selorejo	52,46	10	25
13	Doko	70,95	10	40
14	Wlingi	66,36	9	41
15	Gandusari	88,23	14	45
16	Garum	54,47	9	35
17	Nglegok	92,56	11	37
18	Sanankulon	33,33	12	33
19	Ponggok	103,83	15	46
20	Srengat	53,98	16	40
21	Wonodadi	40,35	11	30
22	Udanawu	40,98	12	25
Jumlah		**1.588,79**	**248**	**637**

Sumber Data :Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat diketahui wilayah kecamatan yang paling luas yaitu Kecamatan Wonotirto yang terletak dibagian Selatan Blitar, dengan luas wilayah 164,54km^2. Disusul kemudian Kecamatan Bakung, dengan luas wilayah 111,24 km^2. sedangkan yang paling sempit yaitu Wilayah Kecamatan Wonodadi dengan luas 40,35 km^2.

e. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari segi kuantitas, dukungan sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar. Per 31 Desember 2021 PNS Kabupaten Blitar tercatat sejumlah 7.538 personil, atau berkurang 4,10 persen dibanding tahun 2020 dimana jumlah PNS tahun 2020 sebanyak 7.860 personil. Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki sebanyak 3.042 orang (40,36%) dan PNS perempuan sebanyak 4.496 orang (59,64%), sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

Gambar
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2021

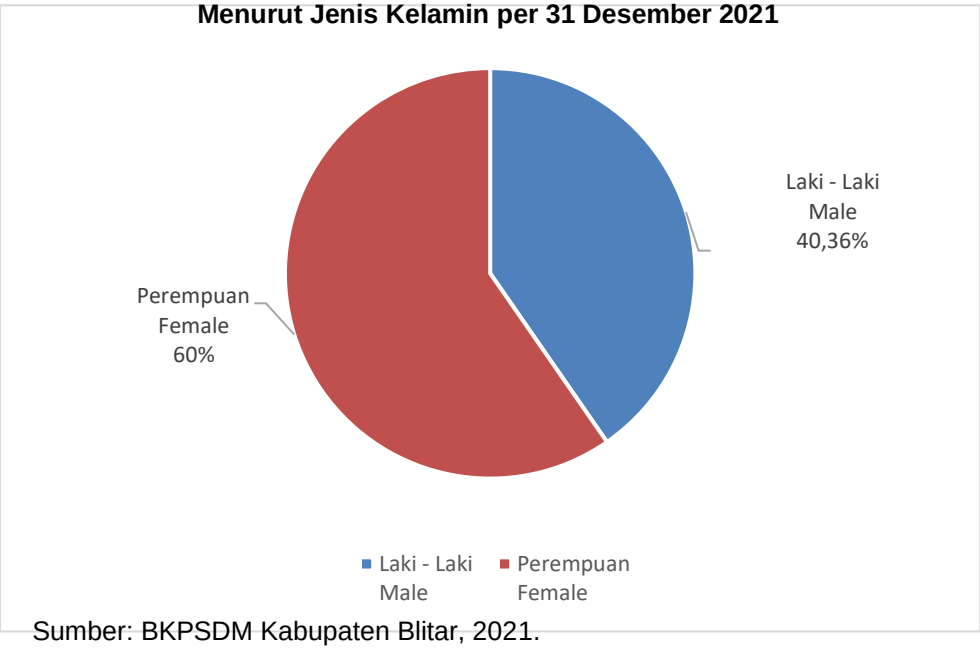

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun jumlah PNS menurut golongan ruang disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2021

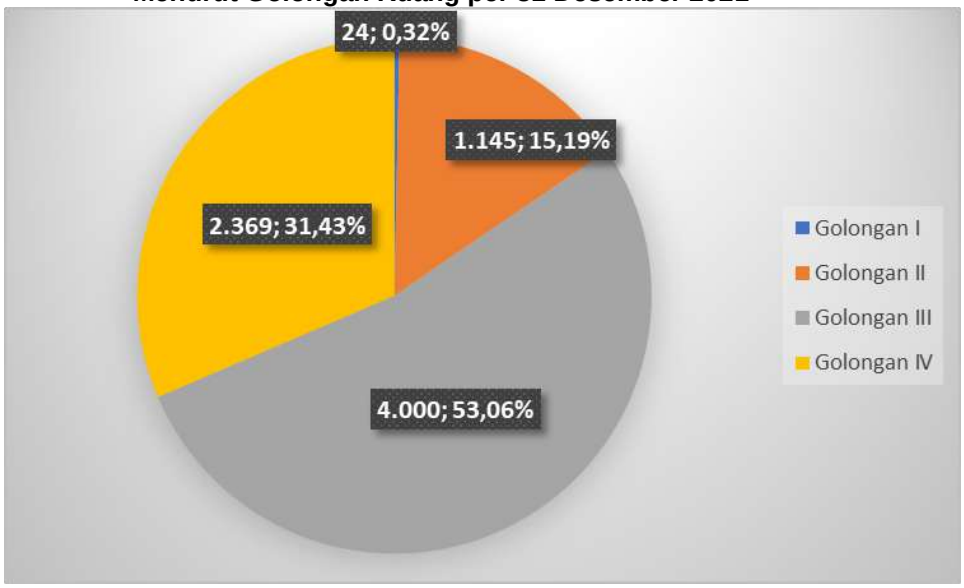

Dari total PNS di Kabupaten Blitar, mayoritas merupakan pegawai golongan III jika dilihat dari Gambar 1.4 sebanyak 4.000 orang (53,06%), sedangkan yang paling sedikit adalah PNS Golongan I dengan jumlah 24 orang (0,32%). Apabila dirinci maka jumlah PNS

di Kabupaten Blitar berdasarkan golongan kepangkatan disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2021

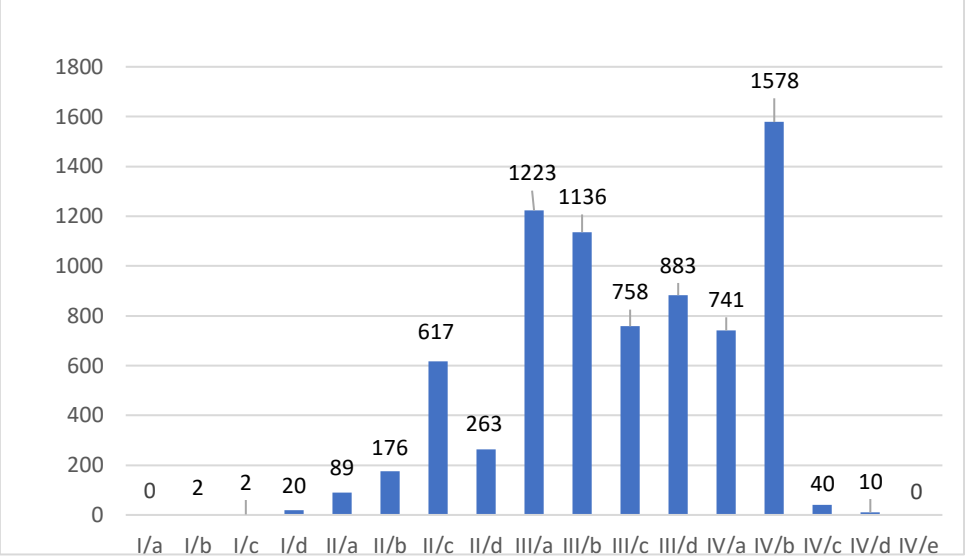

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021, PNS dengan golongan kepangkatan Pembina Tingkat I (IV/b) merupakan jumlah golongan ruang yang terbanyak yaitu sejumlah 1.578 orang. Tidak terdapat PNS dengan golongan kepangkatan Juru Muda (I/a) dan golongan kepangkatan tertinggi adalah Pembina Utama Madya (IV/d) sejumlah 10 orang. Sedangkan berdasarkan Eselon, jumlah PNS Eselon II sebanyak 30 orang, terdiri dari 1 orang PNS Eselon II-A dan 29 PNS Eselon II-B, sedangkan jumlah PNS terbanyak menduduki Eselon IV-A yaitu sejumlah 523 orang dari 868 orang total keseluruhan jabatan struktural yang terisi per 31 Desember 2020 atau lebih rinci disajikan pada Gambar berikut.

Gambar
Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Eselon (orang)

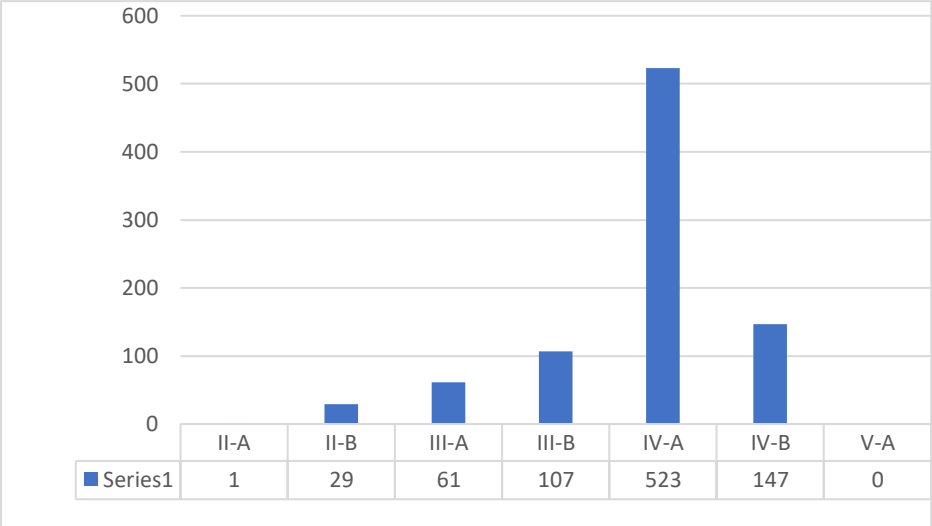

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021

Per 31 Desember 2021, jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana sejumlah 1.983 orang dengan nomenklatur Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, sedangkan untuk PNS dengan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 4.687 orang sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing.

Tabel 1.3

Jumlah PNS Kategori Jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu Di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2021

Uraian	Jumlah
Fungsional Umum/ Jabatan Pelaksana	1.983
Fungsional Tertentu	4.687

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) sejumlah 5.029 orang (66,72%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah S-2 yaitu sejumlah 622 orang atau 8,25% dari total PNS.

Gambar

Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2021

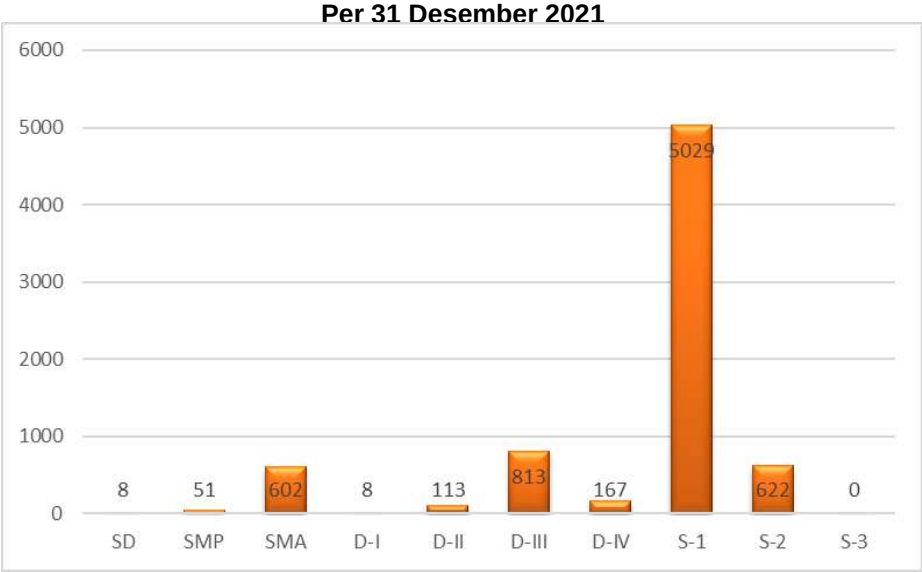

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) sejumlah 5.389 orang (68,56%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah S-2 yaitu sejumlah 813 orang atau 10,34% dari total PNS.

Berdasarkan hasil seleksi CPNS Kabupaten Blitar Tahun 2021 sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2021 Nomor : 18730.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2021, peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 149 peserta. Rincian jumlah dan formasi peserta yang lolos Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel
Jumlah dan Formasi Peserta yang Lolos Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2021

Formasi	Jenis	Jumlah
Disabilitas	Tenaga Kesehatan	2 orang
	Tenaga Teknis	1 orang
Cumlaude	Tenaga Teknis	5 orang
Umum	1. Tenaga Kesehatan	61 orang

	2. Tenaga Teknis	80 orang
Jumlah peserta lolos CPNS**		**149 orang**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2022.
** Data yang diajukan ke BKN untuk penerbitan Pertek.

f. Jumlah Perangkat Daerah

Tabel
Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar
Per 31 Desember 2021

No	Nama Perangkat Daerah	Klasifikasi Tipe (A/B/C)	Jumlah Bidang
1	DINAS PENDIDIKAN	A	4
2	DINAS SOSIAL	A	4
3	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	A	4
4	DINAS KESEHATAN	A	4
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	A	4
6	DINAS TENAGA KERJA	A	4
7	DINAS PERHUBUNGAN	B	4
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A	4
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	A	4
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	A	4
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	A	4
12	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	A	4
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	A	4
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	B	4
15	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	A	4
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	B	4
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	C	4
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN P3A	A	4
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	B	3
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	A	4
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	A	4
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	A	4
23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A	4

24	BKPSDM	A	4
25	INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR	A	4
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	A	4
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	A	4
28	RSUD NGUDI WALUYO WLINGI	B	4
29	RSUD SRENGAT	C	4
30	SEKRETARIAT DPRD	A	4

KECAMATAN

No	Nama Kecamatan	Klasifikasi Tipe (A/B/C)	Jumlah Bidang
1	KANIGORO	A	2 SUBAG 5 KASI
2	GARUM	A	2 SUBAG 5 KASI
3	TALUN	A	2 SUBAG 5 KASI
4	NGLEGOK	A	2 SUBAG 5 KASI
5	SANANKULON	A	2 SUBAG 5 KASI
6	PONGGOK	A	2 SUBAG 5 KASI
7	SRENGAT	A	2 SUBAG 5 KASI
8	WONODADI	A	2 SUBAG 5 KASI
9	UDANAWU	A	2 SUBAG 5 KASI
10	KADEMANGAN	A	2 SUBAG 5 KASI
11	BAKUNG	A	2 SUBAG 5 KASI
12	WONOTIRTO	A	2 SUBAG 5 KASI
13	SUTOJAYAN	A	2 SUBAG 5 KASI
14	PANGGUNGREJO	A	2 SUBAG 5 KASI
15	BINANGUN	A	2 SUBAG 5 KASI
16	WATES	A	2 SUBAG 5 KASI
17	KESAMBEN	A	2 SUBAG 5 KASI
18	SELOREJO	A	2 SUBAG 5 KASI
19	SELOPURO	A	2 SUBAG 5 KASI
20	DOKO	A	2 SUBAG 5 KASI

21	GANDUSARI	A	2 SUBAG 5 KASI
22	WLINGI	A	2 SUBAG 5 KASI

DAFTAR UPT KABUPATEN BLITAR

No	Perangkat Daerah	Nama UPT	Jumlah	Tipe (A/B/C)
1	DINAS PENDIDIKAN	UPT Satuan Pendidikan	687 UPT	-
2	DINAS KESEHATAN	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Perkada Induk	B
		UPT Instalasi Farmasi	-	B
		UPT Puskesmas	24 UPT	-
3	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	UPT Rumah Potong Hewan	Perkada Induk	B
		UPT Pusat Kesehatan Hewan	Perkada Induk	B
		UPT Pembenihan Ikan	Perkada Induk	B
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	UPT Pemadam ebakaran	Perkada Induk	B

g. **Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan**

Pada tahun 2020, jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.184.722.694.458,69. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp2.255.835.919.921,50 atau 103,26% dari target. Pada tahun 2020 terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar 6,05% (2019-2020). Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.255.835.919.921,50, tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada Tahun Anggaran 2020 dapat terealisasi sebesar Rp302.502.755.768,50 atau 121,70% dari target; Dana Perimbangan yang terealisasi sebesar Rp1.469.898.940.288,00 atau 99,59% dari target; serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp483.434.223.865,00 atau 105,05% dari target.

Dana Perimbangan masih menjadi komponen sumber pendapatan daerah terbesar dengan kontribusi mencapai 65,16% dari total

pendapatan daerah. Kontributor terbesar berikutnya berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi mencapai 21,43%. Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang 13,41% dari pendapatan daerah secara keseluruhan.

Tabel
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Pendapatan Asli Daerah	285.742.715.698.86	302.502.755.768,50	13,41	5,87
Dana Perimbangan	1.622.294.376.590,00	1.469.898.940.288,00	65,16	-9,39
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	492.994.860.447,00	483.434.223.865,00	21,43	-1,94
Pendapatan Daerah	**2.401.031.952.735,86**	**2.255.835.919.921,50**	**100,00**	**-6,05**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020*) 2020 = *unaudited*

Kendati memiliki kontribusi terendah dalam struktur pendapatan daerah, realisasi PAD pada tahun 2020 mampu menjadi yang tertinggi dari sisi tingkat pertumbuhan. Secara agregat nilai PAD tahun 2020 meningkat 5,87% jika dibandingkan realisasi PAD 2019. Komponen dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 9,39% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Sebagaimana dana perimbangan itu realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 1,94% dari tahun sebelumnya. Adapun penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada Bab II.

h. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolan keuangan daerah. Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.2.361.222.893.062,95 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.282.907.546.842,85 (96,68%). Pada Tahun Anggaran 2020

terdapat penurunan belanja daerah sebesar 7,29%. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp1.450.126.897.497,77, atau 96,76% dari anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp832.780.649.345,08 atau 96,56% dari target.

Tabel
Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020*) (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Tidak Langsung	1.336.792.062.459,25	1.450.126.897.497,77	63,52	8,48
Belanja Langsung	1.125.495.116.584,46	832.780.649.345,08	36,48	-26,01
Belanja Daerah	**2.462.287.179.043,71**	**2.282.907.546.842,85**	**100,00**	**-7,29**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020*) *unaudited*

Dari pertumbuhan belanja daerah, belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 8,48% dibandingkan tahun 2019 dan belanja langsung mengalami penurunan 26,01% dibandingkan tahun 2019.

Tabel
Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja
Tidak Langsung
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020*) (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Pegawai	954.069.778.391,25	874.892.497.181,00	60,33	-8,30
Belanja Hibah	48.203.225.500,00	120.556.612.500,00	8,31	150,10
Belanja Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	7.020.158.000,00	0,48	-7,87
Belanja Bagi Hasil	11.954.120.468,00	13.792.042.093,85	0,95	15,37
Belanja Bantuan Keuangan	314.872.979.600,00	328.688.033.926,00	22,67	4,39
Belanja Tidak Terduga	71.758.500,00	105.177.553.796,92	7,25	146.471,56
Belanja Tidak Langsung	1.336.792.062.459,25	1.450.126.897.497,77	100,00	8,49

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020*) *unaudited*

Pertumbuhan jumlah agregat Belanja tidak langsung pada tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan pada jenis-jenis belanja yang menjadi determinasinya. Hampir seluruh jenis Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan, kecuali Belanja Pegawai yang menurun 8,30% dan Belanja Bantuan Sosial menurun 7,87% dari pada tahun sebelumnya. Jenis Belanja Tidak Langsung yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah Belanja Tidak Terduga dengan peningkatan sebesar 146.471,56% dari tahun

sebelumnya. Sementara itu kenaikan terbesar berikutnya terjadi pada jenis Belanja Hibah yang tumbuh sekitar 150,10%, diikuti kemudian oleh Belanja Bagi Hasil yang meningkat 15,37%, serta Belanja Bantuan Keuangan yang mengalami kenaikan sebesar 4,39%.

Tabel
Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan
Belanja Langsung Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Pegawai	18.923.196.626,00	14.418.704.760,00	1,73	-23,80
Belanja Barang dan Jasa	588.173.319.658,60	546.362.790.780,99	65,61	-7,11
Belanja Modal	518.398.600.299,86	271.999.153.804,09	32,66	-47,53
Belanja Langsung	**1.125.495.116.584,46**	**832.780.649.345,08**	**100,00**	**-26,01**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020*) *unaudited*

Belanja Langsung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,01%. Seluruh jenis Belanja Langsung mengalami penurunan, dimana penurunan terbesar terjadi pada Belanja Modal sebesar 47,53%. Adapun belanja pegawai turun 23,80% dibanding pada tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terkecil terjadi pada belanja barang dan jasa sebesar 7,11% dibanding tahun 2019.

i. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

a. SiLPA;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi pembiayaan secara rinci sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019		2020*)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	237.740.585.410,26	237.755.424.912,11	191.500.198.604,26	176.531.898.604,26
Penggunaan SiLPA	237.737.285.410,26	237.737.324.912.11	176.500.198.604,26	176.500.198.604,26
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	237.737.285.410,26	237.737.285.410.26	176.500.198.604,26	176.500.198.604,26
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	39.501,85	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	3.300.000,00	18.100.000,00	0,00	31.700.000,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	3.300.000,00	18.100.000,00	0,00	31.700.000,00
Penerimaan Kembali Piutang Pokok Pinjaman Disperindag	3.300.000,00	13.100.000,00	0,00	31.700.000,00
Penerimaan Kembali Piutang Pokok Pinjaman Dinas Peternakan	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	237.740.585.410,26	237.755.424.912,11	176.500.198.604,26	176.531.898.604,26
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**176.500.198.604,26**	**0,00**	**149.460.271.682,91**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020*) *unaudited*

Dari hasil pelaksanaan APBD tahun 2020, secara umum menunjukan kinerja yang semakin baik ditunjukkan dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang semakin kecil dari Rp176.500.198.604,26 menjadi Rp.149.460.271.682,91 atau turun sebesar 15,32 persen dibanding tahun 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Uang Kas di Kas Daerah sebesar Rp113.963.280.928,07
b. Kas di Bendahara BLUD sejumlah Rp113.963.280.928,07, terdiri dari Kas di BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebesar Rp25.004.607.232,48 dan Kas di BLUD Puskesmas Rp10.384.272.497,52.
c. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp108.061.024,84, terdiri dari Kas Bendahara BOS SD sebesar Rp12.038.546,84 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp96.022.478,00.
d. Kas Satgas Covid sebesar Rp50.000,00 yang berada pada Dinas Kesehatan.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi dirumuskan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan

pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 periode ke 4. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Blitar yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar, maka Visi RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 yakni: "Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)*".

Visi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan :

Gambar 5. 1 Nilai-nilai yang Termuat dalam Visi RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat *baldatun, thoyyibatun wa robbun ghofuur.* Secara harfiah dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Blitar Mandiri, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang berdikari, cukup secara fisik dan materi dan tidak tergantung dengan pihak lain.
2. Blitar Sejahtera, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang sehat dan cerdas yang diwujudkan melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketentraman, kondusifitas dan lingkungan asri yang berkualitas.
3. Ahlak Mulia, merupakan kondisi daerah dan masyarakat yang mengedepankan iman dan taqwa serta tetap berpegang pada nilai dan norma yang sesuai dengan kearifan lokal.
4. B*aldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur,* secara harfiah diartikan sebagai ”Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (*Baldatun Thoyyibatun*)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang maha pengampun (*Rabbun Ghafuur*)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Definisi ini merujuk pada Al Quran surah As-Saba ayat 15 yang berbunyi:

> *“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rizki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”. (QS. Saba’: 15).*

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata.

Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut.

MISI 1 "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya."

MISI 2 "Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar."

MISI 3 "Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas."

MISI 4 "Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan."

Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Blitar, berikut merupakan linieritas antara isu strategis dengan misi Kabupaten Blitar tahun 2019-2024:

Tabel
Linearitas Isu Strategis dengan Misi RPJMD
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Visi	MISI	ISU STRATEGIS
TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)	MISI 1: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT BLITAR BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA DENGAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA	Keberpihakan terhadap keberdayaan perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan anak, perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	MISI 2: MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT BLITAR YANG MEMILIKI MUTU DAN NILAI KOMPETENSI	Pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan serta pengembangan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal dan non formal

Visi	MISI	ISU STRATEGIS
	TINGGI, DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI GENERASI MUDA KABUPATEN BLITAR	Memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi
		Percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga
	MISI 3: PENGOPTIMALAN KINERJA PEMERINTAH YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS	Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
		Tututan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
	MISI 4: PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA MELALUI PEMBANGUNAN POTENSI EKONOMI DAERAH DENGAN MENGEDEPANKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN	Pengembangan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD
		Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah
		Akselerasi pembangunan kawasan strategis yang sesuai dengan penataan ruang dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar
		Penyediaan sarana dan prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka kesiapan bencana dan pencemaran lingkungan
		Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak dan ketersediaan air bersih
		Integrasi treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin

Gambaran diatas merupakan wujud bahwa terdapat linieritas isu strategis terhadap misi RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Selain itu hal tersebut juga menunjukkan bahwa disusunnya misi memperhatikan isu dan permasalahan daerah Kabupaten Blitar.

Empat butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka berikut adalah gambaran dari keterkaitan keempat misi tersebut dalam mencapai Visi Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Blitar periode tahun 2021-2026:

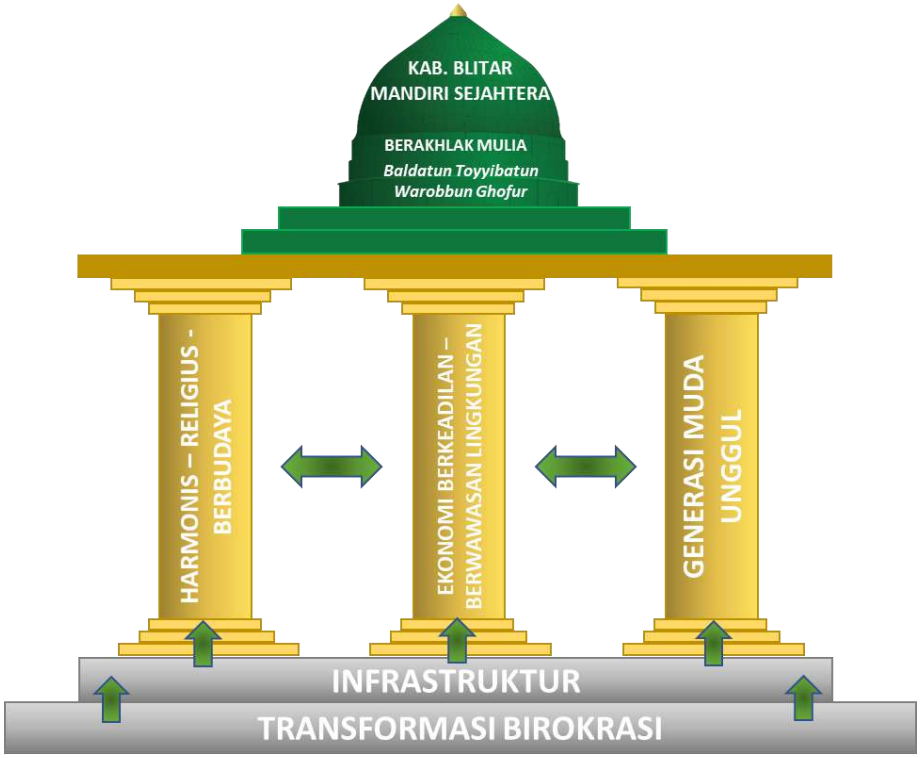

Gambar Keterkaitan antar Misi dalam Mencapai Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambar di atas, dalam mencapai visi pembangunan maka harus terbangun 3 Pilar Utama yaitu Masyarakat yang Harmonis, Religius Berbudaya (Misi 1), Ekonomi yang Berkeadilan dan Berdaya Saing (Misi 4), dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Misi 2). Tercapainya 3 Pilar Utama tersebut harus di dukung dengan 2 Pondasi Pembangunan yaitu pondasi utama adalah terkait dengan misi ketiga yaitu terkait reformasi birokrasi yang merupakan terwujudnya inovasi dalam

pemerintahan, peningkatan penerapan *Electronic Government*, Pelayanan Publik yang Berkualitas, Manajemen pemerintahan yang akuntabel, dan peningkatan kemandirian desa. Kemudian setelah reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik maka fondasi kedua adalah ketercukupan infrastruktur (Infrastruktur dasar dan Infrastrukur Sosial dan Ekonomi).

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

MISI I MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT BLITAR BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA DENGAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan Masyarakat yang Harmonis, Religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi *sosial* diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

Gambar
Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026

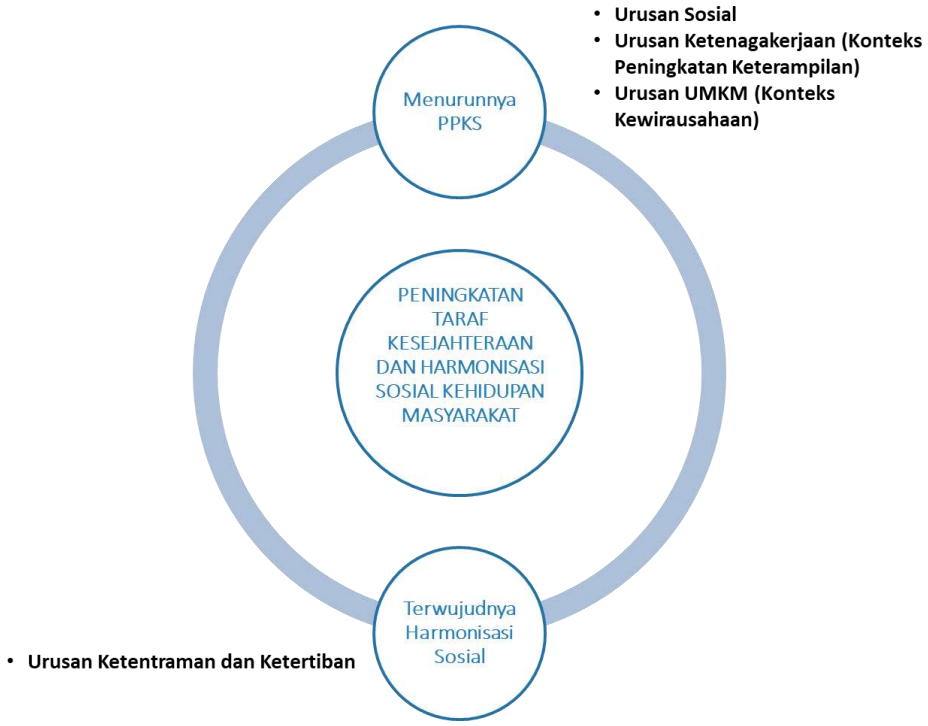

MISI II MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT BLITAR YANG MEMILIKI MUTU DAN NILAI KOMPETENSI TINGGI, DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI GENERASI MUDA KABUPATEN BLITAR

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas dan Akses Kesehatan Masyarakat, dan Peningkatan Pembangunan Gender. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

Gambar Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026

MISI III PENGOPTIMLAAN KINERJA PEMERINTAH YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

Gambar Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026

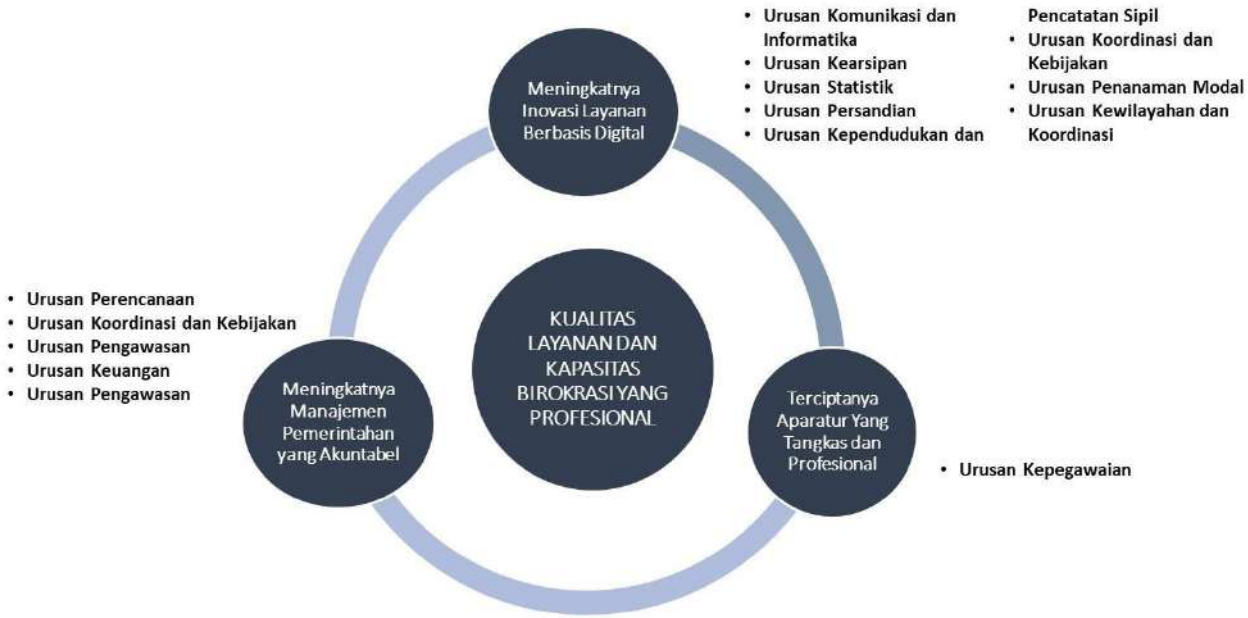

MISI IV PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH DENGAN MENGEDEPANKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi serta Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan PEnguatan Mitigasi Bencana. Representasi tercapainya Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi serta Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur adalah Terciptanya Penurunan Kesenjangan Ekonomi Antar Kelas, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur. Terciptanya Peningkatan Pemerataan dan Daya Saing Ekonomi serta Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur adalah melalui Peningkatan Lapangan dan Kesempatan Kerja, Penurunan Kemiskinan, Peningkatan

Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Peningkatan Daya Saing pariwisata, Peningkatan Investasi Daerah, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

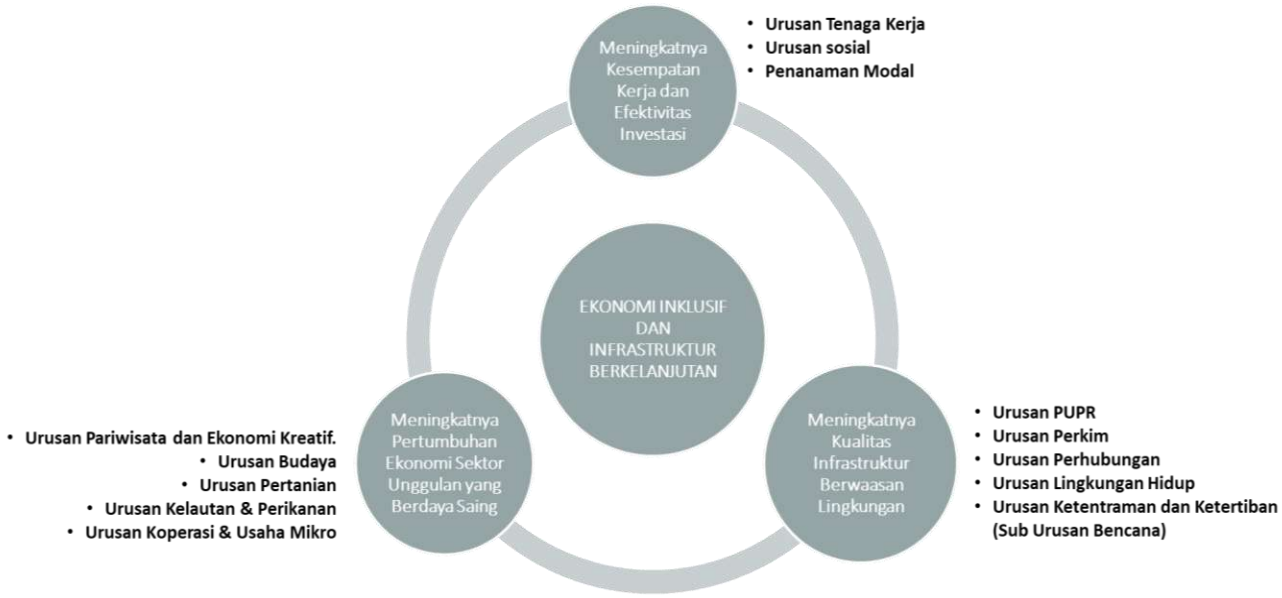

Gambar Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026

Tujuan Dan Sasaran

Merujuk terhadap landasan ideal normatif dalam penyusunan RPJMD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan RPJMD adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah di mana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, sarat utama Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah measurable dan tangible.

Measurable dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah dalam perumusannya, Tujuan dan Sasaran RPJMD harus dapat diukur. Hal

tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) di level Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan Tangible yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berikut merupakan rumusan Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya pada RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026:

Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
   a. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
   b. Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:

Gambar Logical Framework Misi I

Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berperspektif Gender, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
   a. Meningkatnya Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
   b. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:

Gambar Logical Framework Misi II

Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
   a. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa.
   b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:

GambarLogical Framework Misi III

Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni “Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Kelestarian Lingkungan", maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang dibentuk dari sasaran pembangunan:
   a. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarkat.
   b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksessibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.
   c. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah .

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi IV RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:

Gambar Logical Framework Misi IV

Berikut merupakan linieritas antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Periode Tahun 2021-2026:

Tabel *Logical Framework* Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)												
NO	**MISI**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2020)**	**TARGET**					**KOND. AKHIR 2026**
						2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
1	**Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman Dan Taqwa Dengan Kearifan Lokal Budaya**	**MENINGKATKAN TARAF KESEJAHTERAAN DAN HARMONISASI SOSIAL KEHIDUPAN MASYARAKAT**	**Prosentase Penduduk Miskin**	**Persen**	**9,33**	9,30	9,25	9,02	8,94	8,90	**8,88**
		Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	**Persen**	**11,76%**	**11,7**	**11,62**	**11,51**	**11,31**	**11,11**	**10,76%**
		Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	**Indeks**	**n/a**	**80 (Baik)**	**82 (Baik)**	**84 (Baik)**	**86 (Sangat Baik)**	**88 (Sangat Baik)**	**(90) (Sangat Baik)**

2	**Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar Yang Memiliki Mutu Dan Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar**	**MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERPERSPEKTIF GENDER**		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**Indeks**	**92,70**	**92,76**	**92,83**	**92,90**	**92,97**	**93,03**	**93,10**
				Indeks Pembangunan Manusia	**Indeks**	**70,58**	**71,15**	**71,48**	**72,06**	**72,52**	**72,97**	**73,42**
			Meningkatnya Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	**Tahun**	**12,46**	**12,54**	**12,65**	**12,77**	**12,90**	**13,05**	**13,19**
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	**Tahun**	**7,39**	**7,45**	**7,51**	**7,58**	**7,64**	**7,71**	**7,78**
				Usia Harapan Hidup (UHH)	**Tahun**	**73,52**	**73,62**	**73,72**	**73,89**	**74,07**	**74,27**	**74,54**
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	**Indeks**	**n/a**	**54,44**	**55,23**	**56,02**	**56,80**	**57,59**	**58,37**
3	**Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas**	**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**60,66**	**62.56**	**64.46**	**65.96**	**67.46**	**68.96**	**70**
			Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	**Indeks**	**80,94**	**81.94**	**83.44**	**85.24**	**87.14**	**88.24**	**89.24**
			Meningkatnya efisiensi dan	Nilai SAKIP	**Indeks**	**B**	**B**	**B**	**BB**	**BB**	**A**	**A**
				Indeks SPBE	**Indeks**	**2,9**	**3**	**3,15**	**3,3**	**3,4**	**3,45**	**3,5**

			efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	**Indeks**	**59,75**	**61,54**	**64,19**	**67,79**	**71,39**	**74,69**	**78**
				Persentase Desa Mandiri	**%**	**4,09%**	**4,55%**	**5,91%**	**7,27%**	**8,18%**	**9,09%**	**10%**
				Indeks Inovasi Daerah	**Indeks**	**3.922**	**3.978**	**4.035**	**4.092**	**4.149**	**4.206**	**4.263**

Visi:
TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET					KOND. AKHIR
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Sangat Inovatif						
4	**Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dengan Mengedepankan**	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**	**Gini Rasio**	**Ratio**	**0.330**	**0,328**	**0,329**	**0,340**	**0,333**	**0,332**	**0,331**
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	**Indeks**	**n/a**	**70 (Baik)**	**72 (Baik)**	**74 (Baik)**	**76 (Baik)**	**78 (Baik)**	**80 (Baik)**
			Pertumbuhan Ekonomi	**%**	**-2.29**	**2,17**	**4,56**	**7,58**	**5,32**	**5,49**	**5,20**
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Efektifitas Investasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**Tingkat**	**3.82**	**3,72**	**3,52**	**3,4**	**3,25**	**3,17**	**2,99**
			Pengeluaran Perkapita (000)	**Rupiah**	**10,654**	**11,152**	**11,480**	**13,794**	**12,812**	**12,466**	**12,155**
			Indeks Infrastruktur	**Indeks**	**66,07**	**66,88**	**67,83**	**70,80**	**72,77**	**74,53**	**76,66**

	Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan		Indeks Resiko Bencana	**Indeks**	**160,26**	**157**	**154**	**151**	**148**	**145**	**142**
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Indeks**	**72,19**	**68,58**	**69,04**	**69,49**	**69,87**	**70,40**	**70,85**
			Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	**%**	**0.06**	**1,03**	**1,87**	**2,97**	**2,49**	**2,58**	**2.40**
					Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**%**	**-7.24**	**0,95**	**4,61**	**12,04**	**6,73**	**6,82**	**6,60**
					Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	**%**	**-5,26**	**1,76**	**4,14**	**15,04**	**7,82**	**8,11**	**7,47**
					Jumlah Kunjungan Wisata	**jumlah**	**1.532,742**	**1.609.379**	**1.754.223**	**1.836.112**	**2.203.334**	**2.754.168**	**3.029.584**
					ICOR	**Indeks**	**n/a**	**5,82**	**5,80**	**5,73**	**5,75**	**5,74**	**5,76**

b. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

Program Pendidikan Sekolah Dasar.

Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga .Kependidikan.

KESEHATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Pelayanan Kesehatan.

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur.

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan.

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program Pengembangan Perumahan.

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Program Pengembangan Kawasan Permukiman.

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan PembaurProgram.

Pencegahan dan Penanganan Konflik.

Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol

Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pemeliharaan Kantrantibmas.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat.

SOSIAL

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.

Program Pemberdayaan Sosial.

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Program Peningkatan Kesempatan Kerjaan.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak.

PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

PERTANAHAN

Program Fasilitasi Bidang Pertanahan.

LINGKUNGAN HIDUP

Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan.

Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup.

Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan.

Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Program Pelayanan Pencatatan Sipil.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan.

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.

Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa.

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program Pengembangan Data/ Informasi Keluarga dan Gender.

Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

PERHUBUNGAN

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Program Peningkatan Pengendalian Ketetiban dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

KOPERASI DAN USAHA KECIL

Program Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pendukung Usaha.

Program Produksi dan Rekonstruksi Usaha Mikro dan Koperasi.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha.

Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

PENANAMAN MODAL

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan.

Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal.

Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi.

KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olah Raga.

Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya.

STATISTIK

Program tata kelola pengawasan dan pengamanan Persandian.

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan.

Program Layanan dan Pelestarian Arsip.

URUSAN PILIHAN

PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan.

Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan.

PARIWISATA

Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata.

Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

PERTANIAN DAN PANGAN

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian.

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian.

Program Pengembangan SDM Pertanian.

Program Peningaktan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan.

Program Peningaktan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura.

Program Peningaktan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan.

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian.

Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan.

Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

Program Pengembangan IKM.

Program Pengelolaan Pasar Rakyat.

Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

TRANSMIGRASI

Program Ketransmigrasian.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN

PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA

Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Permbangunan.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah.

Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah.

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan.

Program Penelitian dan Pengembangan.

KEUANGAN

Program Penyususnan Anggaran Keuangan Daerah.

Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Program Penatausahaan Keuangan Daerah.

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah.

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian.

Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan.

Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan.

Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan.

Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai.

Program Pangadaan dan Pembinaan Aparatur.

Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/ Infomasi Kepegawaian.

Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

FUNGSI PENDUKUNG URUSAN

KESEKRETARIATAN DAERAH

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Knerja Aparatur Pemerintah.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala.

Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum.

Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengedalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah.

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.

Program Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa.

Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol.

SEKRETARIAT DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran.

Program Penguatan Kelembagaan DPRD.

FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN

Program Fasilitasi Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Program Pelayanan Kecamatan.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Pemberian otonomi yang luas seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilanksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Neraga Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemrintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1,2,3). SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta mayarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensidan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai

dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggungjawabnya dan mewajibkan pemrintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Thun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Blitar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

1.2 Dasar Penerapan

Peraturan perundang yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Kesehatan.
5. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
6. Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Bidang Sosial.
7. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Peneraparan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten
8. Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.
9. Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum.
10. Permen PU dan PR No. 29 Tahun 2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II

CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja makro merupakan Capaian Kinerja yang menggambarkan Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian Kinerja makro dihasilkan dari berbagi program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Capaian Kinerja Makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	70,58	71,05	0,66
2	Angka Kemiskinan (%)	9,33	9,65	3,43
3	Angka Pengangguran(%)	3,82	3,66	-4,188
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,29	3,02	231,878
5	Pendapatan Per kapita (Rp.000,-)	36.023.963,96	37.819.725,73	4,985
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,348	0,422	21,236

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Blitar, 2021 (diolah)

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Penggunaan pertumbuhan ekonomi dan indikator moneter (PDRB per kapita) akan lebih ideal apabila disandingkan dengan indikator sosial, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak ada artinya apabila belum mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Blitar terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Blitar meningkat dari 64,79 pada tahun 2010 menjadi 71,05 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Blitar rata-rata tumbuh sebesar 0,80 persen poin per tahun dan masih bertahan di level “tinggi” sejak tahun 2019. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Blitar. Dimana IPM tahun 2020 tercatat sebesar 70.58 atau tumbuh 0,01 persen poin, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2021, IPM Kabupaten Blitar mencapai 71.05 poin atau tumbuh sebesar 0,47 persen poin terhadap tahun 2020. Nilai IPM pada rentang antara 70-80, termasuk dalam kategori IPM Tinggi.

Gambar
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar, 2010-2021
Kabupaten Blitar Tahun 2010-2021

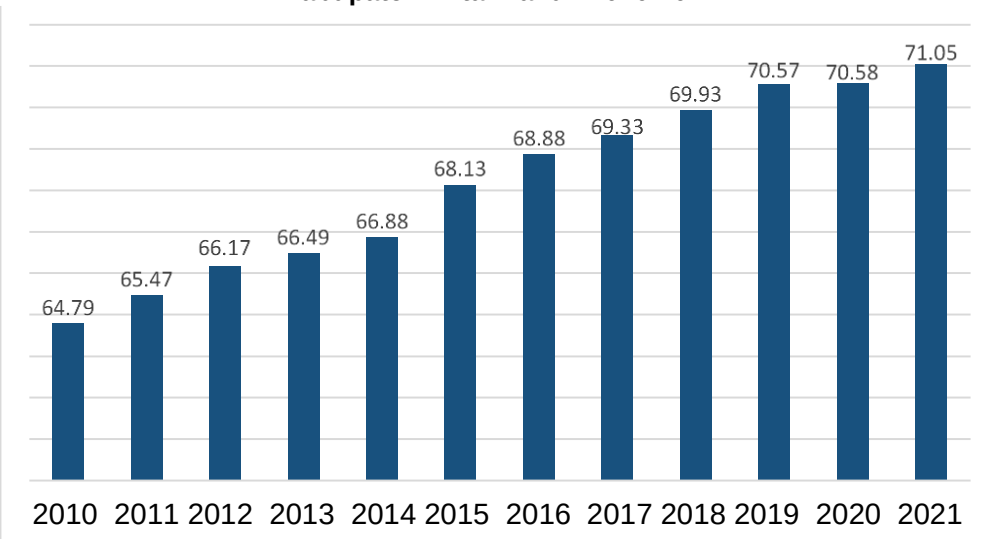

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021 (diolah)

Adapun bila dirinci menurut komponen pembentuknya, maka disajikan dalam tabel berikut.

Tabel

Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
Indeks Kesehatan	0.82	0.82	0.82
Umur Harapan Hidup (tahun)	73.39	73.52	73.61
Indeks Pengetahuan	0.59	0.59	0.60
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.45	12.46	12.63
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.29	7.39	7.50
Indeks Pengeluaran	0.73	0.72	0.72
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.861	10.654	10.757

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2022 (diolah).

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 73.52 tahun (2020) menjadi 73.61 tahun (2021). Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di bidang pendidikan terus berkembang di Kabupaten Blitar. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Apabila dilihat dari rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar selalu mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sehingga kesempatan kerja menurun yang mengakibatkan mengurangi pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Tahun 2021 ini pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar mengalami kenaikan 0,97% dari Rp 10.654,00 di tahun 2020 menjadi Rp Rp 10.757,00.

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan.

Gambar
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2021

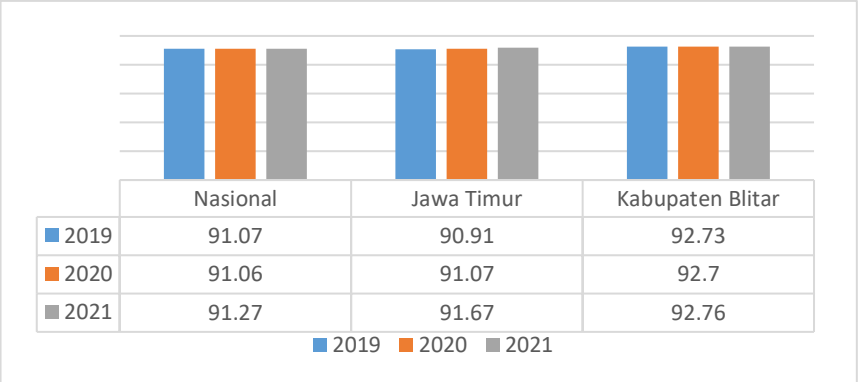

	Nasional	Jawa Timur	Kabupaten Blitar
2019	91.07	90.91	92.73
2020	91.06	91.07	92.7
2021	91.27	91.67	92.76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022.

Naik turun IPG mencerminkan capaian kualitas program-program pembangunan berpengarusutamaan gender terhadap kapabilitas dasar perempuan di suatu wilayah. Nilai IPG sebesar 100 menunjukkan kesetaraan pembangunan manusia antar gender. IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin menjadi 92,76 dan lebih tinggi dibanding IPG Jawa Timur (91,67) dan Nasional (91,27), menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar semakin menuju ke arah peningkatan kualitas hidup yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat peranan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan tingkat manajerial, dan upah pekerja perempuan di sektor non pertanian. IDG Kabupaten Blitar pada 2018-2020 selalu mengalami peningkatan, yang artinya kesetaraan dan keadilan akses perempuan atas kehidupan ekonomi, politik dan manajerial semakin baik sehingga dapat berperan aktif dalam ekonomi maupun politik. Nilai IDG Kabupaten Blitar juga lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dengan memperhatikan nilai IPG dan IDG ini diharapkan ke depan pengambilan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dapat terus dilanjutkan sehingga posisi perempuan akan semakin setara dengan laki-laki dan

peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat semakin nyata.

Gambar
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Blitar
Tahun 2018-2020

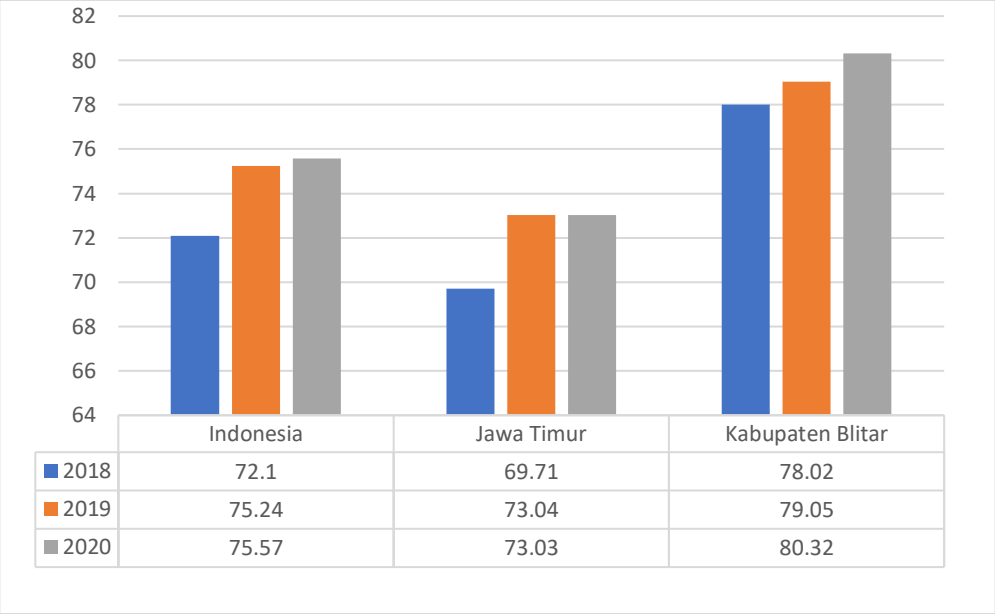

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Selama periode Maret 2020 - Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar bertambah sebanyak 4,08 ribu jiwa, dari 108,55 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 112,62 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 3,76 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar dalam rentang waktu satu tahun tersebut, mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen, dari 9,33 persen pada Maret 2020 menjadi 9,65 persen pada Maret 2021.

Gambar
Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Blitar selama 2021 antara lain adalah:

a. Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari informasi big data (https://dataforgood.facebook.com) pergerakan masyarakat di Kabupaten Blitar yang rata-rata masih -0,14 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

b. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid19, masyarakat di Kabupaten Blitar masih banyak berdiam diri di rumah. Kondisi ini tercermin dari masih tingginya upaya berdiam diri / tetap berada di satu lokasi masyarakat di Kabupaten Blitar yang rata-rata sebesar 0,24 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

Tabel

Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar 2003-2021

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2003	109.407,00	190,90	17,19
2004	124.228,00	179,40	16,13
2005	122.047,00	175,80	16,11
2006	147.545,00	190,40	17,91
2007	159.736,00	171,20	16,47
2008	162.667,00	150,80	14,53
2009	176.518,00	136,80	13,19
2010	192.514,00	135,50	12,13
2011	210.254,00	126,90	11,29
2012	222.899,00	121,60	10,74
2013	236.381,00	120,30	10,57
2014	244.382,00	116,70	10,22
2015	255.966,00	114,12	9,97
2016	272.358,00	113,51	9,88
2017	285.474,00	112,93	9,80
2018	305.440,00	112,40	9,72
2019	318.534,00	103,75	8,94
2020	325.675,00	108,55	9,33
2021	335.573,00	112,62	9,65

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2003-2021

Pandemi Covid-19 mulai terjadi pada bulan Maret 2020 di Indonesia, dan sejak itu aktivitas social dan ekonomi masyarakat mulai berkurang dan dibatasi, untuk dapat fokus pada pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Kabupaten Blitar pada Maret 2021 adalah sebesar Rp335.573,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2020, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp9.898,00 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2021 untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp1.473.165,47 per rumah tangga per

bulan bertambah sebesar Rp314.833,94 per rumah tangga per bulan dibanding kondisi Maret 2020 yang sebesar Rp1.158.331,53 per rumah tangga per bulan.

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Blitar (P2)

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(4)
2003	2,560	0,540
2004	2,100	0,420
2005	2,620	0,610
2006	2,880	0,730
2007	2,490	0,620
2008	3,530	1,130
2009	2,020	0,520
2010	2,350	0,740
2011	1,630	0,350
2012	1,570	0,350
2013	1,680	0,380
2014	1,210	0,230
2015	1,610	0,380
2016	1,530	0,350
2017	1,160	0,220
2018	1,330	0,280
2019	1,130	0,230
2020	1,350	0,300
2021	0,850	0,140

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Pada periode 2020-2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Blitar mengalami penurunan nilai di sebesar -0,500 poin menjadi 0,850 pada tahun 2021. Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,300 pada 2020, menjadi 0,140 pada 2021.

Selama periode 2003-2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1) di Kabupaten Blitar memiliki kecenderungan menurun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Blitar, semakin mendekati Garis Kemiskinan. Hal serupa untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang memiliki kecenderungan menurun dalam rentang 2003-2021 di Kabupaten Blitar. Ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Blitar, tidak terlalu besar. Berdasarkan hal ini dapat diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar penduduk keluar dari Garis Kemiskinan tidak sebesar di tahun 2003 (berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1) dan tidak memerlukan banyak program dikarenakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar relative homogen dibandingkan kondisi tahun 2003 (berdasarkan Indeks Keparahan Kemiskinan/P2).

2.1.3 Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Blitar pada Agustus 2021 sebanyak 657 ribu orang. Dibandingkan dengan Agustus 2020, angka ini berkurang sebanyak 51 orang. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah pengangguran. Pada Agustus 2021, jumlah penduduk yang bekerja dan menganggur di Kabupaten Blitar masing-masing secara berurutan sebanyak 633 ribu orang dan 24 ribu orang. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar seribu orang, sedangkan pengangguran berkurang sekitar seribu orang (Tabel 1).

Sejak Agustus 2018 , secara nasional penyajian data hasil Sakernas yang berkenaan dengan pengelompokan sektor ekonomi mulai menggunakan 17 kategori lapangan pekerjaan menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2015. Namun karena keterbatasan sampel pada level kabupaten/kota, maka penyajian lapangan usaha untuk Kabupaten Blitar dikategorikan ulang menjadi 3 kategori sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.

Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan mengindikasikan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja di setiap lapangan pekerjaan utamanya. Struktur penduduk bekerja di Kabupaten Blitar menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2021 masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 44,79 persen yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (Tabel 2). Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja setelah pertanian adalah kelompok jasa diikuti oleh kelompok manufaktur. Secara berurutan masing-masing yaitu sebesar 36,39 persen dan 18,82 persen.

Tabel
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan		Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan1 Tahun (Agustus 2020 - Agustus 2021)	
		orang	orang	orang	persen
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja		928.391	933.473	5.082	0,55
Angkatan Kerja		657.595	657.544	-51	-0,008
Bekerja	Laki-Laki	379.790	387.824	8.034	2,11
	Perempuan	252.671	245.648	-7.023	-2,86
Pengangguran	Laki-Laki	14.608	13.817	-791	-5,72
	Perempuan	10.526	10.255	-271	-2,64
Bukan Angkatan Kerja		270.796	275.929	5.133	1,89
		(persen)	(persen)	(persen poin)	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		70,83	70,44	-0,39	
- TPAK Laki-Laki		85,07	86,15	1,09	
- TPAK Perempuan		56,63	54,77	-1,87	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		3,82	3,66	-0,16	
- TPT Laki-Laki		3,70	3,44	-0,26	
- TPT Perempuan		4,00	4,01	0,01	

Sumber: BPS Kabupaten Blitar & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021

Sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang melanda dunia, tanpa terkecuali Indonesia, jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar kembali mengalami peningkatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada semua hal, tak terkecuali perekonomian. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dikarenakan nilai produksi yang menurun. Ada yang mengalami PHK, sementara dirumahkan atau yang lebih ringan adalah pengurangan jam kerja. Di Kabupaten Blitar sendiri, terdapat sekitar 55 ribu penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 di tahun 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar selama 16 tahun terakhir membentuk pola fluktuatif serta senantiasa berada pada level di bawah 5 persen. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Blitar sebesar 3,66 persen, turun 0,16 persen poin dibanding pada tahun 2020 . Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat 3 sampai 4 orang yang menganggur di Kabupaten Blitar.

Sebagaimana terlihat pada Tabel, Pada tahun 2021, TPT pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan tertinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 4,13 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja terbesar dan masih belum terserap pasar kerja berada pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan. TPT tertinggi berikutnya pada tingkat pendidikan SMP sebesar 3,74 persen, diikuti SD sebesar 3,68 persen, Perguruan tinggi sebesar 3,56 persen dan SMA sebesar 3,04 persen. Umumnya semakin tinggi tingkat Pendidikan cenderung semakin selektif dalam memilih pekerjaan sehingga tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dibandingkan yang berpendidikan rendah.

Selama setahun terakhir (Agustus 2020 - Agustus 2021), penurunan tingkat pengangguran terjadi pada level pendidikan SMA ke atas, sedangkan sebaliknya jumlah pengangguran di level SMP dan SD kebawah justru naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan jumlah pekerja di sektor formal dimana sektor formal cenderung mensyaratkan pendidikan dan ketrampilan tertentu dibandingkan sektor informal.

Tabel
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020 dan Agustus 2021 (Persen)

Pendidikan	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan
1	2	3	4
SD ke bawah	2,82	3,68	0,86
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3,28	3,74	0,46
Sekolah Menengah Atas (SMA)	4,02	3,04	-0,98
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	6,90	4,13	-2,77
Perguruan Tinggi	7,07	3,56	-3,51

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebesar 5%. Namun, berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar sebagaimana terjadi di lingkup Nasional, perekonomian Kabupaten Blitar pada tahun 2021 terkontraksi hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,02 persen.

Gambar
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

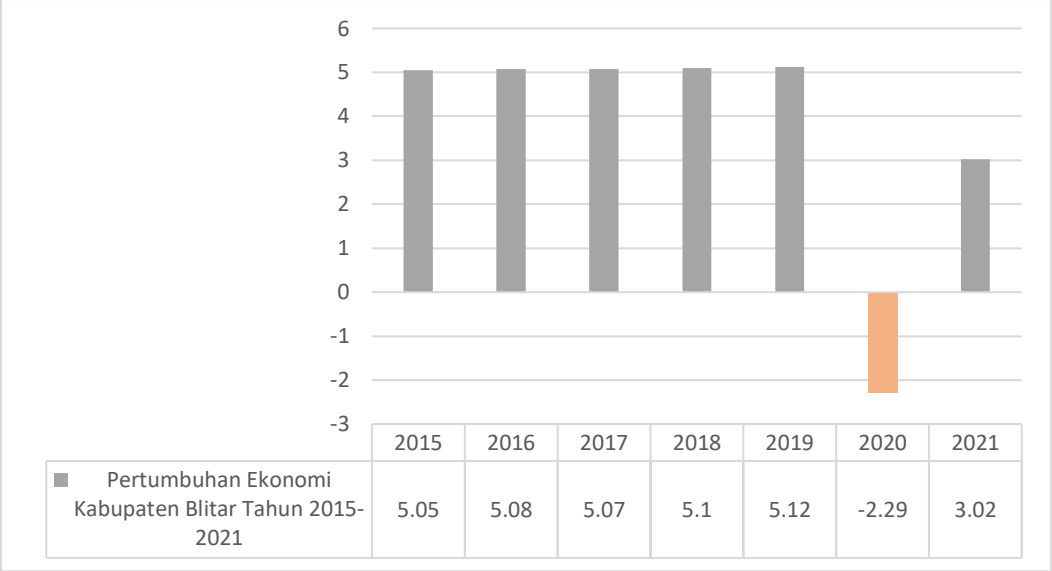

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Sepanjang tahun 2016-2019 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar berada di angka 5 persen. Namun pandemic Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menyebabkan kondisi perekonomian melemah dimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar mengalami kontraksi hingga ke angka -2,64 persen. Kondisi pandemic Covid-19 yang masih berlanjut hingga tahun 2021, dikhawatirkan kembali mempengaruhi sektor ekonomi, namun ternyata di tengah upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, kinerja beberapa sektor usaha mengalami pertumbuhan yang pesat, diantaranya sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,10 persen dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,88 persen.

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sebesar Rp 37.819.725,50 atau naik sebesar 4,98% dibanding tahun 2020. Kenaikan PDRB ADHB ini juga diikuti

dengan kenaikan PDRB ADHB per kapita dari Rp 29.437.475,00 di tahun 2020 menjadi Rp 30.722.442,00.

Gambar
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

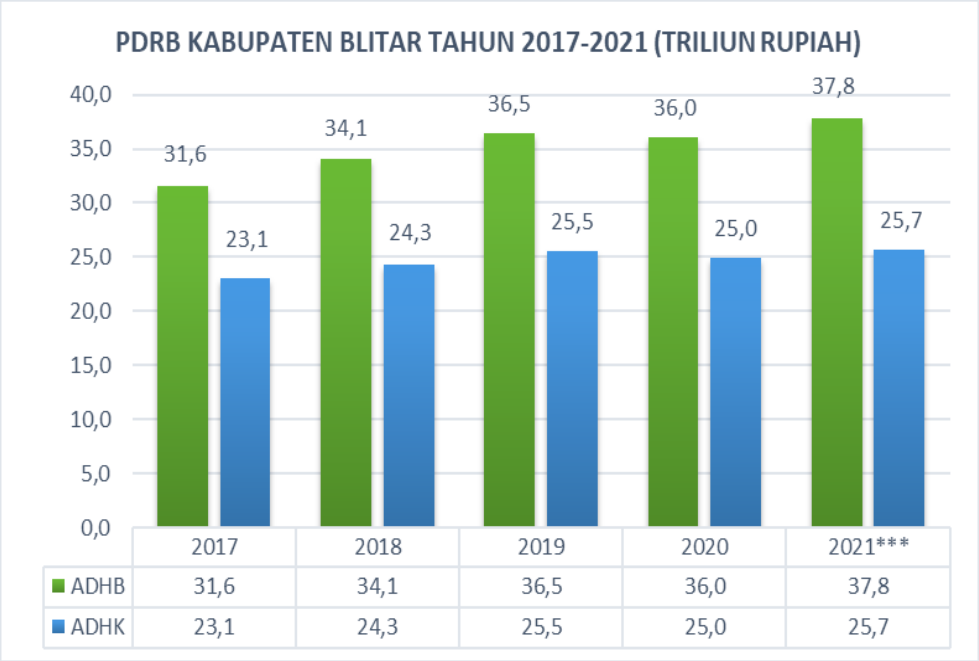

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021
*** Angka Sangat Sangat Sementara

Indikator penting lainnya terkait perkembangan perekonomian daerah adalah tingkat inflasi yang menunjukkan perkembangan harga-harga komoditas pada rentang waktu tertentu sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

Gambar
Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022.

Berdasarkan Gambar 1.10 terlihat bahwa tingkat inflasi Kabupaten Blitar tahun 2021 sebesar 1,64 persen turun 0,29 persen dibanding tahun 2020. Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar mengacu ke Kota Kediri, karena Kabupaten Blitar bukan merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota penghitungan angka inflasi di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki kedekatan geografis dan kemiripan struktur ekonomi, maka pola konsumsi masyarakat di kedua wilayah ini tidak jauh berbeda sehingga tingkat inflasi Kota Kediri menjadi acuan tingkat inflasi di Kabupaten Blitar. Dari penghitungan angka inflasi di 8 kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) selama Desember 2021, seluruhnya mengalami inflasi. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh kenaikan harga hampir seluruh kelompok pengeluaran. Selama tahun 2021, dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh kelompok diantaranya mengalami inflasi, serta satu kelompok mengalami deflasi. Tiga besar kelompok dengan inflasi tertinggi terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, kemudian diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi. Apabila harga-harga meningkat secara moderat, maka perusahaan bisa mendapatkan kenaikan keuntungan. Keuntungan tersebut akan mendorong perusahaan untuk berekspansi sehingga membuka lebih banyak lapangan kerja maupun dapat memberikan gaji yang lebih tinggi sehingga dapat mengungkit daya beli masyarakat.

Pendapatan Per kapita

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sebesar Rp. 35.637.517.200,00 atau turun sebesar 2,22% dibanding tahun 2019. Penurunan PDRB ADHB ini juga diikuti dengan penurunan PDRB ADHB per kapita dari Rp.31.388.367,00 di tahun 2019 menjadi Rp.30.599.363,00. Dan untuk capaian kinerja angka PDRB Tahun 2020 berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional karena Kabupaten Blitar masih bertumpu pada sektor pertanian

yang memiliki nilai tambah produksi rendah. Angka kemiskinan di Kabupaten Blitar selama 4 tahun 2016 – 2019 selalu mengalami penurunan yang signifikan, dengan rata-rata -3,22% per tahun. Tahun 2016 masih di angka 9,88% dan terus menurun menjadi 8,94% di tahun 2019. Akan tetapi tahun 2020, seiring dengan adanya Pandemi Covid-19, maka tingkat pencatatan perkapita penduduk menurun, banyaknya aktivitas ekonomi yang tutup dan kegiatan sosial yang berhenti, maka daya beli masyarakat ikut menurun dan angka kemiskinan merangkak naik menjadi 9,33% atau naik 4,36%. Namun demikian, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibaagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut ini akan dijabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang memuat data / informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing – masing urusan.

Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

A. Urusan Pendidikan

A.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3		4	6
	PENDIDIKAN				
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	275	
		2)	Jumlah peserta didik PAUD (NegerI dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	
		3)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	
		4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	3760	
		5)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1648	
		6)	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1523	
		7)	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	549	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1)	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	763	
		2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1908	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1826	
		4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1908	
		5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1826	
		6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	0	
		7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	0	
		8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4931	
		9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2050	
		10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		
		11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		
		12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	603	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	387	
		14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4667	
		15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1983	
		16)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	468	
		17)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	101	
		18)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	391	
		19)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	241	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	763	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		2)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1908	
		3)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		
		4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		
		5)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		
		6)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		
		7)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		
		8)	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		

A.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2021

NO	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3		4	6
1	**PENDIDIKAN**	1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94.196	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	89.176	

NO	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	88.18	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.843	

B. Urusan Kesehatan

B.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	KESEHATAN				
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1)	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	8	
2	Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	8	
3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1369279	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	4035	
4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	42168	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	4035	
5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	84390	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	4035	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1129148	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	4035	
7	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	218260	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	4035	
8	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2145197	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4035	
9	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1121195	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4035	
10	Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	535	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4035	
11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	40615	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4035	
12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	320	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4035	
13	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	73673	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4035	
14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	184820	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4035	

B.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
2	**KESEHATAN**	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.068	
		2	Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	50	
		3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	82.169	
		4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	79.075	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
		5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	88.848	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	78.178	
		7	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34.41	
		8	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	45.781	
		9	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91.45	
		10	Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29.408	
		11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96.247	
		12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	95.854	
		13	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	43.02	
		14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	67.876	

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	
		2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	
		4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	
		5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	
		6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	
		7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	35840	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	551584	
		3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	134859	
4	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	TIDAK	
		2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	TIDAK	
		3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	ADA	
		4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	
		5)	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2	
5	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	83	
		2)	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	168	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		3)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	251	
		4)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	
		5)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	
		6)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	251	
		7)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	84.57	
		8)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	
		9)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	3.75	
		10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	68.86	
		11)	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	
		12)	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	
		13)	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	3.75	
		14)	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	1)	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		2)	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	181	
		3)	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	
		4)	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA	
		5)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	1315	
		6)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	1315	
		7)	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1315	
		8)	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	1315	
7	Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1383.27	
		2)	Panjang jalan yang dibangun	1450	
		3)	Panjang jembatan yg dibangun	3	
		4)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	62.87	
		5)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	9	
		6)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	124.04	
		7)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	9	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		8)	Panjang jalan yang dipelihara	5181	
		9)	Panjang jembatan yang dipelihara	0	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	0	
		2)	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		
		3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota		
		4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		
		5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	
		6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	
		7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	
		8)	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		
		9)	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		10)	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		
		11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis		
		12)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota		
		13)	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	
		14)	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	
		15)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas iusaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		16)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		17)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		18)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	
		19)	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	
		20)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	
		21)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	
		22)	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	
		23)	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		24)	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		25)	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	580	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				

C.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	0	NIHIL
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	0	NIHIL
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	2756.215	
		4	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	79.752	
		5	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	69.8	
		6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100	
		7	Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota	88.023	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	

D. Urusan Perumahan Rakyat

D.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	
		2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	3	
		3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3	
		4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	2	
		5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	
		6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	
		7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	
		8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3	
		9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		4)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		5)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		6)	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1)	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	14.13	
		2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	821	
		3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	14.13	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1)	Jumlah rumah di kab/kota	432270	
		2)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	821	
		3)	Jumlah rumah tidak layak huni	11398	
		4)	Jumlah rumah yang tidak dihuni		
		5)	Rasio rumah dan KK	0.88	
		6)	Jumlah rumah pembangunan baru	0	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	1563	
		2)	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1839	
		3)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1839	
		4)	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	1839	
		5)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	
		6)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	1839	
		7)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	
		8)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	
		9)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	

D.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
4	**PERUMAHAN RAKYAT**	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	150	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	NIHIL
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	28.232	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2.637	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	84.992	

E. Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

E.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	TRANTIBUMLINMAS				
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	89	
		2)	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	400	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	3)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	68	
		4)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6	
		5)	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	
		6)	Tersedianya sarana prasarana minimal	2	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	
		2)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1)	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	
		2)	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	
		3)	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0.05	
		4)	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0.35	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		5)	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	
		6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0.85	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	
		2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	
		3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	
		4)	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	20	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1)	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	104	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	2)	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	
		3)	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	
		4)	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan	0	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
			evakuasi di setiap keluarahan/desa		
		5)	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	25	
		6)	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	1	
		7)	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	
		8)	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	

E.2 Indikator Kinerja Kunci Hasi

Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
5	**TRANTIBUMLINMAS**	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	5.882	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1242207	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	1242207	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
			kesiapsiagaan terhadap bencana		
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10400	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100	

F. Urusan Sosial

F.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	SOSIAL				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1)	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	
		2)	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1	
		3)	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	
		4)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	33	
		5)	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		6)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	33	
		7)	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	
		8)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	33	
		9)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	1	
		10)	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	3	
		11)	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	
		12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	33	
		13)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	
		14)	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4	
		15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	33	
		16)	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		17)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	33	
		18)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	43	
		19)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	33	
		20)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	33	
		21)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	33	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	154	
		2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	
		3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	248	
		4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	
		5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	154	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		6)	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	4	

F.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
6	**SOSIAL**	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	

2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

A.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	TENAGA KERJA				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	17	
		2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		
		3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1)	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	
		2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	70.13	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	13.33	
		4)	Persentase LPK yang terakreditasi	13.33	
		5)	Persentase LPK yang memiliki perizinan	66.67	
		6)	Jumlah penganggur yang dilatih	0	
		7)	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	
		8)	Persentase penyerapan lulusan	0	
		9)	Lulusan bersertifikat kompetensi	100	
		10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	15	
		11)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	15	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	
		2)	Data tingkat produktivitas total	51	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	20.3	
		2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	72.73	
		3)	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	11	
		4)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	28.57	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	45.11	
		6)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	6.02	
		7)	Jumlah mogok kerja	0	
		8)	Jumlah penutupan perusahaan	0	
		9)	Jumlah perselisihan kepentingan	3	
		10)	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	
		11)	Jumlah perselisihan PHK	2	
		12)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	
		13)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	
		14)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	
		15)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	25	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	1)	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1426	
		2)	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2384	
		3)	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	18	
		4)	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	
		5)	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	7	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		6)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	
		7)	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	8	
		8)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2	
		9)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	1328	
		10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	1328	
		11)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	1608	
		12)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	15	
		13)	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	2995	
		14)	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	1	

A.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
7	**TENAGA KERJA**	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.026	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40.57	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	73.684	
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	58.054	

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	51	
		2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	34	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	
		2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	248	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	
		4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	248	
		5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	298	
		2)	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	
		3)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	
		4)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	
		5)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	29	
		6)	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	
		7)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	

B.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3.816	

		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.017	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4.699	

C. Urusan Pangan

C.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PANGAN				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1)	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	14	
		2)	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	
		3)	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	
		4)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	241356000	
		5)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	
		6)	Tertanganinya kerawanan pangan	210802000	
		7)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	
		8)	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	96500000	

C.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
9	**PANGAN**	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	254.746	

D. Urusan Pertanahan

D.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pertanahan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PERTANAHAN				
1	Persentasepemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	2)	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	3)	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	4)	Dokumen Izin membuka tanah	0	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	5)	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				

D.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pertanahan Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
10	**PERTANAHAN**	1	Persentasepemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0	NIHIL
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	77.444	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	NIHIL
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	

E. Urusan Lingkungan Hidup

E.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	55 87.46 0	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	1)	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	5	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1)	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	4124	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0.11	
		3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0	
		4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	
		5)	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100	

E.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
11	**LINGKUNGAN HIDUP**	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	65.53	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	36.67	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	31.373	

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Perekaman KTP-el	1)	Penerbitan akta perkawinan	269	
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	2)	Penerbitan akta perceraian	0	
3	Kepemilikan akta kelahiran	3)	Penerbitan akta kematian	12866	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	4)	Penyajian data kependudukan	100	

F.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	1	Perekaman KTP-el	97.43	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	42.764	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	94.505	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	16.667	

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

G.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				

1	Persentase pengentasan desa tertinggal	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	220	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	10	
		3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	10365	
		4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	79	

G.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	NIHIL
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	17.544	

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

H.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	
		2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23.61	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8.42	
		4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	92.68	
		5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	37	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1)	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes)yang siap melayani KB MKJP	78.85	
		2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	78.97	
		3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	7	
		4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	18.29	
3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	1	
		2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	76.96	

H.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.39	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78.968	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
		3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0.797	

I. Urusan Perhubungan

I.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Perhubungan
Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PERHUBUNGAN				
1	Rasio konektivitas Provinsi	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100	
		2)	Terlaksananya pelayanan uji berkala	85.81	
		3)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	4)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	39.99	

I.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
15	**PERHUBUNGAN**	1	Rasio konektivitas Provinsi	76.25	
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.31	

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

J.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	
		2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	
		3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	182	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	19.08	
		2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	119.61	
		3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	
		4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	4.03	
		6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	
		7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	48.39	
		8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	
		9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	
		10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	
		11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	
		12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	
		13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	50	
		14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota	100	
		2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan	100	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
			strategi komunikasi (STRAKOM)		
		3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	

J.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	56.522	
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	79.099	

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

K.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerah kabupaten/kota	0	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	0	
		3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.48	
		4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	52.56	
		5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	34.65	
		6)	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1.07	
		7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.96	
		8)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	47.32	
		9)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30.21	
		10)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50.46	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		11)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.97	
		12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19.52	
		13)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.5	
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.77	
		2)	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	
		3)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.11	
		4)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.32	
		5)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.16	
		6)	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.85	
		7)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.19	

K.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	21.388	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0.982	

L. Urusan Penanaman Modal

L.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PENANAMAN MODAL				
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		
		2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	
		3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	
		4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	6	
		5)	Kegiatan pameran penanaman modal	2	
		6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	
		7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	6	
		8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	9732	
		9)	Laporan realisasi penanaman modal	872000000000	
		10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	7	
		11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		
		12)	Tersedianya data daninformasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	4	

L.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
18	**PENANAMAN MODAL**	1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	-31.064	

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

M.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5894	
		2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	5894	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1)	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	272	
		2)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1	
	Peningkatan prestasi olahraga	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	525	
		2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	

M.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2.223	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5.806	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	19	

N. Urusan Statistik

N.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Statistik Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	STATISTIK				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1)	Tersedianya buku profil daerah		
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	20	
		3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	4	
		4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	4	
		5)	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	
		6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	90	
		7)	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	85.29	

N.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Statistik Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
20	**STATISTIK**	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	39.216	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	39.216	

O. Urusan Persandian

O.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PERSANDIAN				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	
		2)	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	74.41	
		3)	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	
		4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	

O.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
21	**PERSANDIAN**	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	

P. Urusan Kebudayaan

P.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	KEBUDAYAAN				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	10	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	7	
		3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	7	
		4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	1	
		5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	15	
		6)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	0	
		7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	
		8)	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	
		9)	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	
		10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	452	
		11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	1264	
		12)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	1264	
		13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		14)	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	
		15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	
		16)	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	9	
		17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	1	
		18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	
		19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	4	

P.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
22	**KEBUDAYAAN**	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	

Q. Urusan Perpustakaan

Q.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PERPUSTAKAAN				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	45.86	
		2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	6.13	
		3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0	
		4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.92	
		5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	56	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	
		2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	
		3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	

Q.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
23	**PERPUSTAKAAN**	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	36.6	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11.07	

R. Urusan Kearsipan

R.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Kearsipan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1)	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	78.05	
		2)	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	19.99	
		3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	
		4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	4.25	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	
		2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	
		3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	
		4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	
		5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	
		6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	

R.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Kearsipan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
24	**KEARSIPAN**	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	7534.25	

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	

2.2.3 Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan Dan Perikanan

A.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	87	
		2)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	
		3)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	21	
		4)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	204	
		5)	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	437865000	

A.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Keterangan

	URUSAN PILIHAN				
1	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	20256	

B. Urusan Pariwisata

B.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PARIWISATA				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	79	
2	rsentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota	2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	79	
3	Tingkat hunian akomodasi	3)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	79	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0	
		6)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	
		7)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	
		8)	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	3.55	
		9)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	35.53	
		10)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	29	

B.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
2	**PARIWISATA**	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-96.25	
		2	rsentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota	7.106	
		3	Tingkat hunian akomodasi	1162.778	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	381.74	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6654145387.87	

C. Urusan Pertanian

C.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Pertanian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PERTANIAN				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1)	Sarana pertanian yang diberikan	288	
		2)	Prasarana pertanian yang digunakan	81	
		3)	Penerbitan izin usaha pertanian	358	
		4)	Persentase prasarana yang digunakan	100	
		5)	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	100	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1)	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	71.43	

C.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pertanian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
3	**PERTANIAN**	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0.055	
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-16.568	

D. Urusan Perdagangan

D.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PERDAGANGAN				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1)	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. – b. 57.14	
		2)	Persentase penerbitan TDG	11.76	
		3)	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG		
		4)	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		
		5)	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota		
		6)	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu		
		7)	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		
		8)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	1)	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	69.25	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2)	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	6.57	
		3)	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		

D.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
6	**PERDAGANGAN**	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0	NIHIL
		2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	62.324	
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	6.569	

E. Urusan Perindustrian

E.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Perindustrian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	PERINDUSTRIAN				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota		
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota				
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0.09	

E.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Perindustrian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
7	**PERINDUSTRIAN**	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	-88.645	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	NIHIL
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Hasil		Capaian Kinerja	Keterangan
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	NIHIL
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0	NIHIL
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70	

F. Urusan Transmigrasi

F.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Urusan Transmigrasi Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	TRANSMIGRASI				
8		1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	
		2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	3	
		3)	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	3	

2.2.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Urusan Perencanaan dan Keuangan

A.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Perencanaan Dan Keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
9	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**	1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9.464	
		2	Rasio PAD	1.364	

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures)	13.95	
		6	Opini Laporan Keuangan	10	

B. Urusan Pengadaan

B.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Pengadaan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
10	**PENGADAAN**	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	
		3	Rasio nilai belanja yangdilakukan melalui pengadaan	34.859	

C. Urusan Kepegawaian

C.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Kepegawaian Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
11	**KEPEGAWAIAN**	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	296.887	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26.471	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	37.778	

D. Urusan Manajemen Keuangan

D.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Manajemen Keuangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
12	**Manajemen Keuangan**	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0.9196	
		2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	43.8234	
		3	Manajemen Aset	61	
		4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	6.547	

E. Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

E.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Urusan	Indikator Kinerja Keluaran Keluaran		Capaian Kinerja	Keterangan
13	**Transparansi dan Partisipasi Publik**	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja memuat informasi kinerja baik keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana mekanisme perencanaan yang dilaksanakan mulai dari RPJMD dan RKPD pemerintah Kabupaten Blitar sebagai bentuk pertanggungjawaban public. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah, yang sudah disesuaikan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021. Penyusunan LKjIP tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD ini memiliki 4 misi yang diuraikan ke dalam 4 tujuan, 9 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. RPJMD disusun dengan berdasarkan hasil analisis isu-isu daerah sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2026 – 2026 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan good and clean governance, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang

kemudian di dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja sebagai target kinerja Pemerintah Daerah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuaraikan sebagai berikut :

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Pengukuran Kinerja

Tabel
Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	8,65	9,65	94,93%
		2. Pendapatan per kapita (juta rupiah/ orang/tahun)	40,35	30,07	74,52%
		3. Indeks Daya Beli	0,7266	0,7266	100%
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,46	3,66	34,43%
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	5. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) (%)	96,74	91,51	94,59%
3.	Terwujudnya stabilitas wilayah	6. Persentase penanganan konflik (%)	100%	100%	100%
		7. Persentase penegakan PERDA (%)	100%	95%	95%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	8. Indeks Pendidikan	0,66	0,66	100%
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas	9. Indeks Kesehatan	0,8220	0,8220	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
	kesehatan masyarakat				
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	10. Indeks Pemberdayaan Gender	78,50	79,04	100,69%
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	11. Nilai SAKIP	A	B	57,15%
		12. Nilai LPPD	3,0542	3,0542	100%
		13. Opini BPK	WTP	WTP	100%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14. Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sangat Baik	Baik	75%
9.	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	15. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,23%	4,45	61,55%
		16. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	7,78%	4,69	60,28%
		17. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	3%	1,66%	55,34%
		18. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)	5.742.647	5.814.832	101,26%
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	19. Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71	65,53	92,30%
		21. Persentase Ketaatan Tata Ruang	85	85	100%
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	22. Persentase desa berstatus pratama (%)	0	0	100%

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Table

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	8,65	9,65	94,93 %	8,88	9,33	94,93%
		2. Pendapatan per kapita (juta rupiah/ orang/tahun)	40,35	30,07	74,52 %	37,31	30,59	81,99%
		3. Indeks Daya Beli	0,7266	0,7266	100%	0,70	0,72	102,86 %
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,46	3,66	34,43 %	2.51	3,82	65,70%
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	5. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) (%)	96,74	91,51	94,59 %	91,51	99,62	108,86 %
3.	Terwujudnya stabilitas wilayah	6. Persentase penanganan konflik (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		7. Persentase penegakan PERDA (%)	100%	95%	95%	95%	95%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	8. Indeks Pendidikan	0,66	0,66	100%	0,64	0,59	92,19%
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Indeks Kesehatan	0,8220	0,8220	100%	0,8214	0,8234	100,24 %
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	10. Indeks Pemberdayaan Gender	78,50	79,04	100,69 %	78,10	79,05	101,33 %
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	11. Nilai SAKIP	A	B	57,15 %	BB	B	92,9%
		12. Nilai LPPD	3,0542	3,0542	100%	3,054		
		13. Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14. Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sangat Baik	Baik	75%	Sangat Baik	Baik	92,81%
9.	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM	15. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	7,23%	4,45	61,55 %	7,03	-0,49%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	berbasis pertanian dan pariwisata	terhadap PDRB (%)						
		16. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	7,78%	4,69	60,28 %	7,78%	-0,37%	0%
		17. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	3%	1,66%	55,34 %	3%	-0,16%	0%
		18. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)	5.742.647	5.814.832	101,26 %	2.194.367	3.776.719	172,11 %
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	19. Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71	65,53	92,30 %	70	68,65	98,07%
		21. Persentase Ketaatan Tata Ruang	85	85	100%	84	100	142%
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	22. Persentase desa berstatus pratama (%)	0	0	100%	0	0	100%

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

NO	Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,33	9,30	9,25	9,02	8,94	8,90	8,88
		Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS	Persen	11,76	11,7	11,62	11,51	11,31	11,11	10,76
		Terwujudnya Penghayatan dan Penerapan Nilai – nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	80 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)

			Gotong royong dalam Kehidupan Masyarakat									
2	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi, dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berperspektif Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,70	92,76	92,83	92,90	92,97	93,03	93,10
				Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,58	71,15	71,48	72,06	72,52	72,97	73,42
			Meningkatnya Kualitas dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,46	12,54	12,65	12,77	12,90	13,05	13,19
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,39	7,45	7,51	7,58	7,64	7,71	7,78
				Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,52	73,62	73,72	73,89	74,04	74,27	74,54
			Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	n/a	54,44	55,23	56,02	56,80	57,59	58,37

3	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,66	62,56	64,46	65,96	67,46	68,96	70
		Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik hingga ke Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,94	81,94	83,44	85,24	87,14	88,24	89,24
		Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Indeks	B	B	B	BB	BB	A	A
			Indeks SPBE	Indeks	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	3,95	4,1
			Indeks Sistem Merit	Indeks	99	135	200	230	255	280	305
			Persentase Desa Mandiri	%	4,09	4,55	5,91	7,27	8,18	9,09	10
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	n/a	65,25	70,25	75,25	80,25	85,25	87,25
4	Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri	Gini Rasio	Ratio	0,330	0,328	0,329	0,340	0,333	0,332	0,331
			Indeks Kepuasan Layanan	Indeks	n/a	70	72	74	76	78	80

	Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	dan Berkelanjutan		Infrastruktur (IKU)			(Baik)	(Baik)	(Baik)	(Baik)	(Baik)	(Baik)
				Pertumbuhan Ekonomi		%	-2,29	2,17	4,56	7,58	5,32	5,49	5,20
			Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat		Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT)	Tingkat	3,82	3,72	3,52	3,4	3,25	3,17	2,99
					Pengeluaran Perkapita (000)	Rupiah	10,654	11,152	11,480	13,794	12,812	12,466	12,155
			Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesbilitas Perekonomian yang Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur	Indeks	66,07	66,88	67,83	70,80	72,77	74,53	76,66
					Indeks Resiko Bencana	Indeks	160,26	157	154	151	148	145	142
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,35	64,90	65,45	66,00	66,54	67,09	67,64
			Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,06	1,03	1,87	2,97	2,49	2,58	2,40

					Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-7,24	0,95	4,61	12,04	6,73	6,82	6.60
					Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	-5,26	1,76	4,14	15,04	7,82	8,11	7,47
					Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah	1.532.742	1.609.379	1.754.223	1.836.112	2.203.334	2.754.168	3.029.584
					ICOR	Indeks	n/a	5,82	5,80	5,73	5,75	5,74	5,76

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati Kabupaten Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan

Strategis 1

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Angka Kemiskinan (%)	8,94	88,88	9,33	94.93 %	0,39%	8,65
Pendapatan per kapita (juta rupiah/orang/tahun)	31,40	37,31	30,59	81,99 %	-0,81	40,35
Indeks Daya Beli	0,73	0,70	0,72	102,86 %	0,01	0,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11	2,51	3,82	65,70 %	0,71	2,70
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**83,52 %**		

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam mendukung pencapaian kinerja Menurunnya Angka Kemiskinan ini antara lain: Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun realisasi programprogram pendukung sasaran strategis adalah:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Sosial	3.046.295.857	2.801.264.367	91,96%
Dinas Tenaga Kerja	4.179.891.200	4.133.076.419	98,88%
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.233.694.281	1.193.340.487	96,73%
Serapan Anggaran	**8.459.881.338**	**8.127.681.272**	**95,86%**

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / Penurunan	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	80,01	91,51	99,62	108,86 %	19,61	96,74
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**108,86 %**		

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur tercapai sebesar 108,86% atau Kategori **Sangat Berhasil.** Indikator ini disusun dengan 5 sub indikator, yaitu 3 indikator berupa persentase jalan kondisi mantap, prosentase jembatan dalam kondisi mantap, dan jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan, 2 sub indikator yaitu persentase rumah tangga berakses air minum dan rumah tangga bersanitasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja masing-masing sub indikator tersaji sebagai berikut:

Indikator	OPD	Target	Realisasi	Capaian
Jalan Kondisi Baik (%)	PUPR	84,59%	68,95%	81,51%
Jembatan Kondisi Baik (%)	PUPR	86,02%	86,48%	100,53%
Saluran Irigasi Kondisi Baik (%)	PUPR	91%	100%	109,89%
Fasilitasi Pendampingan Air Minum (keg)	Perkim	17	17	100,00%

Indikator	OPD	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Drainase Lingkungan (m)	Perkim	9.000	9.555	106,17%
Realisasi Kinerja Layanan Infrastruktur				**99,62%**

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.345.556.639,50	94.789.433.920,00	94,46%
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37.181.043.050,00	36.706.996.610,00	98,73%
Dinas Perhubungan	4.813.324.900,00	4.720.522.944,00	98,07%
Serapan Anggaran	**142.339.924.590,00**	**136.216.953.474,00**	**97,09%**

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Stabilitas Wilayah

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase penanganan konflik (%)	100%	97%	100%	103%	-	100
Persentase penegakan PERDA (%)	95%	95%	95%	100%	-	100
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**102%**		

Capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Stabilitas Wilayah mencapai 102% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja tersebut didukung

oleh target kinerja Bakesbangpol dalam membina 9 ormas dan partai politik melalui penguatan legalitas yang berijin terdaftar. Parpol dan ormas yang dibina difokuskan pada parpol dan ormas yang sudah lolos seleksi dalam pengajuan bantuan hibah parpol dan ormas tahun sebelumnya untuk pembinaan administrasi keuangan, kelembagaan dan fungsionaris parpol dan ormas. Fasilitasi juga dilaksanakan partai politik dan organisasi sosial masyarakat, yang dilakukan sebanyak 10 kali dalam bentuk kegiatan: Workshop Keuangan Lembaga Politik; Sosialisasi pendidikan politik Pilkada; Pembinaan administrasi parpol; dan Deklarasi Pemilu Damai 2020.

Perbandingan Data Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020

NO	URAIAN	2015	2020
1	Yang dipilih	Ya dan tidak	Paslon 1 Rijanto-Marheinis Paslon 2 Rini-santoso
2	Jumlah DPT	962.903	961.971
	Laki-laki	479.450	479.923
	Perempuan	483.453	482.048
3	Suara sah	502.382	621.252
4	Suara tidak sah	41.528	24.010
5	Yang tidak menggunakan hak pilih		
	Laki-laki	290.138	229.900
	Perempuan	254.865	254.039

Capaian kinerja prosentase penanganan konflik sosial didukung salah satunya oleh beberapa inovasi pelayanan dilakukan oleh Bakesbangpol. Dalam rangka mendukung/ optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan pada Tahun 2020 Bakesbangpol Kabupaten Blitar melakukan inovasi berupa pengembangan Peta Mitigasi Konflik dan program M2I (Mempacasilakan Manusia Indonesia). Kedua inovasi tersebut telah diikutkan ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopylipulara) Kabupaten Blitar Kategori Puri (Purwarupa Inovasi) dan *Innovative Goverment Award* (IGA) 2020. Kebijakan pengembangan ini mampu meningkatkan stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Blitar sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Capaian kinerja Satpol PP antara lain penegakan peraturan daerah dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di

Kabupaten tercapai 100%, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Org/RT) tercapai 1 orang satuan linmas untuk tiap RT, dan pemenuhan rasio siskamling di setiap desa/kelurahan ada 9 pos siskamling. Untuk capaian kinerja waktu tanggap daerah layanan wilayah pemadam kebakaran (WMK) masih 30 menit, maka Satpol PP harus memperpendek waktu respon menjadi 15 menit sesuai SPM. Secara umum capaian kinerja sasaran strategis terlaksana dengan baik dengan *refocusing* anggaran pada prioritas kegiatan pendukung sasaran strategis yang ditetapkan. Perangkat daerah dan realisasi anggaran sasaran strategis terwujudnya stabilitas wilayah yaitu:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.692.141.490	4.438.046.0688	94,58%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.359.390.562,50	8.125.747.783,00	97,21%
Satuan Polisi Pamong Praja	3.242.055.000	2.780.083.600	85,75%
Serapan Anggaran	**16.293.587.053**	**15.343.877.451**	**94,17%**

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pendidikan	0,5888	0,64	0,59	92,19%	0,02	0,66
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**92,19%**		

Capaian rata-rata sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan sebesar 92,19% atau Kategori **Berhasil**. Realisasi capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Indek Pendidikan tahun 2016 adalah 0,573853 dan naik signifikan di tahun 2017 menjadi 0,5873 dan tahun berikutnya sampai 2020 trennya tetap naik meskipun moderat, yang mana pada tahun 2020 nilainya menjadi 0,5900. Berbagai program prioritas dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan

pendidikan sebagai pelayanan dasar, antara lain peningkatan kapasitas kepala sekolah SD dan SMP, peningkatan kompetensi dan kreativitas pembelajaran era Covid-19, fasilitas dan pendampingan sekolah adiwiyata, teknis penerapan pendidikan anti korupsi sekolah, penerapan kurikulum responsif gender, dan sampai dengan pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak melalui pelatihan parenting. Beberapa Inovasi pendidikan yang telah dilakukan antara lain Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM PINTAR).

Dinas Pendidikan terus meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk SD/MI mencapai 95% dan SMP/MTs sebesar 98%, perluasan akses pendidikan untuk meningkatkan rasio sekolah dan anak usia sekolah yang sudah mencapai 1:153 anak, peningkatan kompetensi guru dengan minimal kualifikasi S1 yang sudah mencapai 95%. Capaian kinerja pendidikan juga terus membaik yang dapat dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Angka rata-rata sekolah menjadi faktor penting dalam membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian angka rata-rata lama sekolah terus meningkat moderat selama 5 tahun terakhir, di mana tahun 2016 di angka 7,6 tahun dan di tahun 2020 menjadi 8,09 tahun atau naik rata-rata 0,016 per tahun. Sedangkan, untuk indikator angka melek huruf juga menunjukan angka kenaikan yang moderat dimana tahun 2016 sebanyak 94,16% dan pada akhir tahun 2020 menjadi 94,70%. Salah satu faktor rendahnya kenaikan ini adalah kesadaran oleh masyarakat terhadap pendidikan formal masih cukup rendah dan masih kurang intensifnya program wajib (kejar paket) belajar.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategi:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pendidikan	765.941.599.542	753.818.001.585	98,42%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.251.063.883	3.198.099.237	95,25%
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1.421.368.750	1.166.790.399	82,90%
Serapan Anggaran	**770.614.032.175**	**758.182.891.221**	**92,19%**

Sasaran : Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Strategis 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kesehatan	0,8214	0,8214	0,8234	100,24%	0,02	0,8220
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**100,24%**		

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan mencapai 100,24% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Berbagai program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sasaran strategis tersebut antara lain meningkatkan luasan akses sarana kesehataan melalui pembangunan RSUD Srengat, kualitas pelayanan Rumah Sakit Rujuan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, pemenuhan rasio tenaga kesehatan dan penduduk yang terus membaik, peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil, melahirkan, dan balita melalui puskesmas dan posyandu, program pencegahan penyakit melalui imunisasi, intensifikasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular, program penanganan atas kesehatan jiwa. Program pengembangan pola hidup sehat (PHBS) untuk mencegah adanya penularan Covid-19 menjadi prioritas kegiatan Dinas Kesehatan. *Refocusing* anggaran dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan penyakit menular di masa pandemi ini.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Kesehatan	258.686.542.584	231.615.168.773	89,54%
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	7.556.315.430,00	6.339.184.964,00	83,89%
RSUD	178.946.060.576	205.263.338.923	87,18%
Serapan Anggaran	**445.188.918.590**	**443.217.692.660**	**86,87%**

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Strategis 6

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pemberdayaan Gender	79,15	78,10	79,05	101,33%	(0,1)	78,50
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**101,33%**		

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak adalah sebesar 101,33% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Berbagai program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan terus dilakukan, antara lain dalam sektor ekonomi, dari total 229.695 angkatan kerja perempuan di tahun 2020, diperoleh partisipasi perempuan sebanyak 201.306 orang. Sedangkan, partisipasi dalam bidang politik dan kelembagaan juga terus dilakukan. Indeks Pemberdayaan Gender terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, yaitu 77,15 poin tahun 2017 terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi sebesar 79,05 poin dan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2019.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar tahun 2020 seiring dengan adanya pandemi Covid-19 mengalami penurunan kecil. Kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat mengalami penurunan sehingga menyebabkan aktivitas kehidupan yang rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap peran kehidupan sosial masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Ditambah lagi, peran perempuan yang harus lebih fokus pada urusan domestik rumah tangga, yaitu menjaga kesehatan keluarga untuk mencegah dan menangani dampak penularan covid-19, maka peran sosial ekonomi dan politik perempuan lebih fokus pada kegiatan domestik. Namun demikian, selama 3 tahun terakhir, 2017 – 2019, angka indeks pemberdayaan gender Kabupaten Blitar terus di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional, serta angka yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pada kondisi kehidupan sosial masyarakat yang normal, komitmen dan pencapaian kinerja gender di Kabupaten Blitar terus meningkat.

Terkait dengan perlindungan anak, program prioritas untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar bekerjasama dengan seluruh OPD melalui berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi kepada seluruh Desa/Kelurahan dan sekolah di Kabupaten Blitar. Tahun 2019 terdapat 5 Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan Pembentukan Desa Kelurahan Layak Anak dan tahun 2020 terus ditingkatkan menjadi 248 desa. Kerjasama lintas sektor bidang pendidikan, seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan mulai PAUD hingga SMP, 29 SMA/SMK Negeri dan Swasta di bawah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta 145 Madrasah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Blitar telah berkomitmen untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Hasilnya, Kabupaten Blitar kembali berhasil untuk mempertahankan

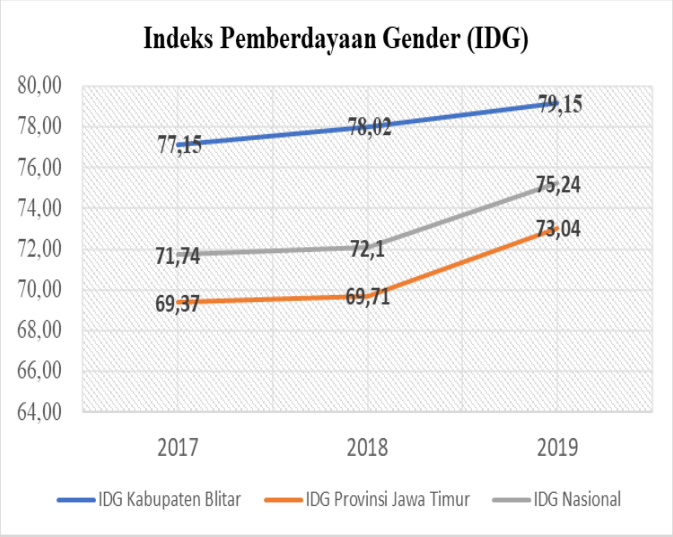

predikat “**Kabupaten Layak Anak Dengan Kategori Madya”** pada tahun anggaran 2020.

Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)	1.066.967.120	971.322.870	91,03%
Serapan Anggaran	**1.066.967.120**	**971.322.870**	**91,03%**

Sasaran : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah

Strategis 7

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Nilai SAKIP	B	BB	B	91%	-	BB
Nilai LPPD	3,1238	3,0540	0,0624	100,28%	-	0,0542
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	-	WTP
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**97,19%**		

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah 97,19% atau

Kategori **Berhasil.** Sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja nilai SAKIP menunjukkan kenaikan yang baik selama 4 (empat) tahun terakhir, Tahun 2016 nilai SAKIP sebesar 50,54 atau peringkat CC dan akhir tahun 2019 menjadi 68,47 poin atau nilai B. Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan

meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan kegiatan *(refocusing)* yang benar-benar mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan.

Sasaran strategis berupa Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah, juga ditunjukkan dengan indikator Nilai LPPD. Nilai LPPD Kabupaten Blitar menunjukkan pertumbuhan dan kenaikan nilai yang cukup berarti, dan hampir setiap tahun target tersebut dapat di capai. Sedangkan, untuk indikator predikat WTP sebagai indikator penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar mampu mempertahankan predikat WTP ini selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan komitmen dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diandalkan.

Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 telah menetapkan 11 (sebelas) OPD sebagai pilot *project* Pembangunan Zona Integritas, yaitu : DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dispendukcapil, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Sanankulon, Puskesmas Wlingi dan Puskesmas Srengat. Pada tahun 2020, diajukan 6 (enam) OPD untuk OPD ZI menuju WBK yang masih proses.

- RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan nilai pada PMZI yaitu 86,18
- DPMPTSP dengan nilai pada PMZI yaitu 79,82
- Puskesmas Wlingi dengan nilai pada PMZI yaitu 78,13
- Puskesmas Srengat dengan nilai pada PMZI yaitu 79,43
- BPBJ dengan nilai pada PMZI yaitu 75,48
- Dinas Perhubungan dengan nilai pada PMZI yaitu 78,55

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah ini melibatkan beberapa Perangkat Daerah yang terkait, antara lain: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. SAKIP sendiri adalah sebuah siklus sistem dimana dalam

proses perencanaan sampai evaluasi harus konsisten dan saling terkait dan mendukung. Adapun detail realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Sekretariat Daerah	30.820.572.845	28.044.015.362	90,99%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.151.002.119	5.268.126.594	85,65%
Inspektorat	8.812.341.358	8.554.796.037	97,08%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.502.176.979	6.332.135.425	97,38%
Serapan Anggaran	**52.286.093.301**	**48.199.073.418**	**92,78%**

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Strategis 8

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	Baik	100%	-	Sangat Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**100%**		

Capaian kinerja sasaran strategis atas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Survei kepuasan masyarakat (SKM) dilakukan daerah setiap tahun. Tahun 2018 SKM dilakukan terhadap 3 perangkat daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan RSUD Ngudi

Waluyo. Hasil nilai IKM sebesar 66,97 poin atau kategori Kurang Baik. Berbagai rekomendasi kebijakan diberikan kepada OPD sasaran dan kembali dilakukan SKM pada 4 OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Hasil SKM tahun 2019 berhasil diperoleh nilai IKM sebesar 82,95 atau Kategori Baik. Survei tahun 2019 digunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang mencakup 9 unsur penilaian, sebagai pengganti Nomor 16 Tahun 2014.

Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain:, Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun realisasi programprogram pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.825.887.000	4.198.290.751	87,00%
Badan Kepegawaian dan	8.178.814.913	7.788.213.030	95,22%
Pengembangan SDM			
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.233.694.281	1.193.340.487	96,73%
Dinas Pendidikan	765.941.599.542	753.818.001.585	98,42%
Sekretariat DPRD	30.820.572.845	28.044.015.362	90,99%
Dinas Kesehatan	258.686.542.584	231.615.168.773	89,54%
RSUD	178.946.060.576	205.263.338.923	87,18%
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.992.033.233	8.947.942.001	99,50%
Badan Pendapatan Daerah	39.969.869.891	39.330.663.901	98,40%
Serapan Anggaran	**1.297.595.074.865**	**1.280.198.974.813**	**93,66%**

Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Strategis 9

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,29	7,03	-0,49	0%	-	7,23
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	7,78	7,78	-0,37	0%	-	7,38
Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	1,62	3%	-0,16%	0%	-	3,00
Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp.000)	5.742.647	2.194.367	3.776.719	172,11%	-	4.980.712
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**41,03%**		

Capaian rata-rata kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata adalah 41,03% atau Kategori **Kurang Berhasil** jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) buah. Penyebab utama ini adalah adanya resesi ekonomi global yang dipicu oleh Pandemi Covid19 tahun 2020. Pandemi berdampak pada seluruh kehidupan tidak terkecuali perekonomian daerah, yaitu Penurunan PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi menjadi -2,64% dari rata-rata pertumbuhan di atas 5%. Pendapatan perkapita

penduduk juga mengalami penurunan yaitu dari 31,3 juta pertahun menjadi 30,6 juta pertahun untuk ADHB dan untuk ADHK tahun 2010 turun dari 22 juta pertahun menjadi 21,3 juta pertahun. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar ini memberikan dampak terhadap beberapa indikator ekonomi sektoral antara lain angka pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB yang terkontraksi -1,06% yang jauh di bawah target yaitu 7,03% dan angka pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang terkontraksi -2,85 yang juga jauh di bawah target pertumbuhan yaitu 7,78%. Sedangkan, angka pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB yang masih tumbuh lambat sebesar 1,01% yang juga di bawah target daerah yaitu 3%. Ketiga indikator target kinerja ekonomi daerah ini tidak mampu memenuhi target kinerja daerah dalam laporan akuntabilitas kinerja daerah Inovasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar yaitu program Kang Jimbang, Abang Marko dan Abang Informal sebagai upaya untuk mengembangkan dan menata menejemen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sedangkan, Dinas Peternakan dan Perikanan melaunching Pelayanan Kesehatan Hewan melalui program Reaksi Keren dan Cepat (Kawan Kece) yang mempermudah pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Beberapa Perangkat Daerah pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ini antara lain: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.172.112.050	6.060.392.695	84,50%
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.607.788.498	5.210.879.410	92,92%
Dinas Pertanian dan Pangan	738.176.000	734.369.775	99,48%
Dinas Peternakan dan Perikanan	6.763.994.558	6.273.319.051	92,75%

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga	995.470.000	928.995.500	93,32%
Serapan Anggaran	**21.277.541.106**	**19.207.956.431**	**90,27%**

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Perijinan

Strategis 10

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	Baik	100%	-	Baik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**100%**		

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Perijinan tercapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Realisasi investasi di Kabupaten Blitar terus meningkat setiap tahun dengan kemudahan perijinan investasi yang hanya 1 jam selesai. Nilai IKM Pelayanan Perijinan DPMPTSP menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahun. Tahun 2017 nilai IKM sebesar 76,06 poin, dengan menindaklanjuti hasil IKM maka dilakukan kebijakan perbaikan tindak lanjut, sehingga tahun 2018 naik menjadi 79,35 poin dan akhir tahun 2019 meningkat lagi menjadi 81,5 poin. Program pelayanan investasi di era pandemi covid-19 tahun 2020 justru mendorong semangat inovasi bagi dinas ini. Pada tahun ini setidaknya ada 2 inovasi yang dilakukan yaitu “Ini Baru Joss Banget Mas” dan “Fast DS”. Program “Ini Baru Joss Banget Mas” meningkatkan akses pelaku usaha dapat lebih mudah untuk memohon/mandaftarkan izin usaha dan investasi Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan izin usaha hanya dari rumah saja meskipun pada malam hari. Sedangkan, *Digital Signature* adalah aplikasi *I-Mobile* (sekarang Imobil v.2), inovasi aplikasi pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik berbasis website. Aplikasi ini mendorong proses perizinan lebih efektif dan efsien, sehingga nilai kepuasan pelayanan diharapkan meningkat dengan nilai 84,22 poin (kategori Baik).

Sepanjang tahun 2020, sebanyak 8 investor/penanam modal nasional masih tetap menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar. Rp.1.402.605.782.271,-. Realisasi investasi tahun 2020, karena dampak pandemi covid-19, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019 akan tetapi mendekati nilai realisasi investasi tahun 2018. Beberapa investor tersebut antara lain PT. Gideatama Perkasa dengan nilai investasi 500 milyar, PT. Kebon Agung dengan nilai investasi Rp.53,8 milyar dan PT. Nusantara Medika Utama dengan nilai investasi Rp. 44,7 milyar. Animo investasi yang tinggi tersebut, selain karena adanya pertimbangan pasar, juga karena adanya kemudahan berbagai layanan perizinan dan non perizinan yang ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai inovasi sistem pelayanan yang terus dilakukan oleh dinas penanaman modal. Sementara itu, realisasi investasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasi investasi sebesar Rp. 1,4 triliun sedangkan pada tahun 2019 realisasi investasi mencapai Rp. 4,6 triliun dengan realisasi investasi kategori PMA sebesar Rp. 1,4 triliun dan realisasi investasi kategori PMDN sebesar Rp. 3,1 triliun. Untuk kenaikan realisasi investasi PMA pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,2 triliun sementara kenaikan realisasi investasi PMDN pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,9 triliun. Angka realiasi pertumbuhan investasi sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir yaitu 267,68% pertahun. Sedangkan, tahun 2020, nilai realisasi investasi mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, sehingga beberapa investor menahan diri untuk investasi. Nilai investasi tahun ini Rp.1.402.605.782.271,- dengan jumlah investor sebanyak 8 usaha. Namun, nilai realisasi investasi ini sama dengan tahun 2018 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2017.

Berbagai kegiatan promosi investasi daerah dilakukan 11 kali antara lain pameran di Kementerian Luar Negeri, pameran APKASI, pameran di Bandung, pameran EJI di Surabaya, pameran TEI di Jakarta, pameran akhir tahun di Kantor Bupati Blitar, *matchmaking* pelaku usaha di Malang, dan ikut serta dalam kegiatan promosi DPMPTSP Provinsi di Bali, Manado dan Batam, serta disusun buku peta potensi daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi *leading sector* pencapaian sasaran strategis ini dengan realisasi program sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.233.694.281	1.193.340.487	96,73%
Serapan Anggaran	**1.233.694.281**	**1.193.340.487**	**96,73%**

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan

Strategis 11

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,9	70	68,65	98,07%	-3,2	71
Persentase Ketaatan Tata Ruang (%)	80	100	100	100%	20	85
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**99,04%**		

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan adalah 99,04% atau Kategori **Berhasil** yang menggunakan 2 (dua) indikator. Capaian kinerja IKLH didukung oleh 3 indikator kinerja lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. IKLH Kabupaten Blitar tahun 2020 selama 5 tahun terus mengalami kenaikan rata-rata 1,33 poin sampai dengan tahun 2019. Tahun 2015 nilai IKLH sebesar 66,31 poin dan angka ini terus naik secara moderat sehingga tahun 2019 bernilai 69,90 dan capaian kinerja tahun 2019 adalah 100% dari target. Akan tetapi, seiring dengan adanya kebijakan *refocusing* annggaran akibat pandemi covid-19, maka dilakukan rasionalisasi anggaran secara signifikan hampir 50%.

Sehingga, banyak program/kegiatan lingkungan yang terpaksa harus dialokasikan untuk program pencegahan dan penanganan pandemi covid-19.

Dari 3 indikator tersebut IKLH, 2 indikator tercapai kinerja nya 100% yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam 2 tahun berturut-turut yaitu 2019 dan 2020, dan 1 indikator yaitu kualitas air tidak tercapai yaitu tahun 2019 tercapai 93,48% dan tahun 2020 tercapai 84,75%. Tahun 2019, Indeks Kualitas Udara terealisir 99,44 poin melampaui target kinerja ditetapkan yaitu 98,73 poin atau tercapai 100,72% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan terealisir 50,66 poin yang melampaui target 50,21 poin atau tercapai 100,90%. Sedangkan, untuk Kualitas Air hanya tercapai 93,48% yaitu terealisir 66 poin dari 70,6 poin target yang ditetapkan. Secara umum, capaian kinerja pada 3 indikator IKLH tahun 2020 semua mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Tahun 2020, Indeks Kualitas Udara terealisir 100,94 poin melampaui target kinerja ditetapkan yaitu 99,44 poin atau tercapai 101,51%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan terealisir 50,91 poin yang melampaui target 50,66 poin atau tercapai 100,49%, dan untuk indikator Kualitas Air tercapai 84,75% yaitu terealisir 60 poin dari 70,8 poin target yang ditetapkan. Maka, secara umum capaian kinerja seluruh unsur IKLH tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Berbagai inovasi program prioritas pencapaian kinerja gerakan lingkungan telah dilakukan antara lain 1) Gerakan Blitar Menanam yang tahun 2020 dilakukan pada 47 lokasi meliputi pantai, desa, RPH, dan tepi sungai dengan jumlah bibit ditanam sebanyak 21.825 bibit dan melibatkan sebanyak 3.234 orang; 2) Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik) yang tahun 2020 dilakukan 4 lokasi yaitu RTH Kanigoro, Pasar Srengat, Jembatan Glondong dan Tepi Sungai Lodagung, yang mana gerakan ini sudah dilegalkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik, 3) Gerakan Terpadu Kali Bersih (Getar Kasih) sebagai gerakan sadar fungsi sungai dan menjaga

kebersihannya yang dilakukan pada 12 lokasi sungai (kali) dan sudah dilegalkan dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 dan didukung pembentukan pengurus Forum Kali Bersih, sosialisasi dan pembinaan, dengan kegiatan bersih-bersih sampah dan limbah di Sungai Lemon pada tanggal 02 Maret 2020, Sungai Brantas di Desa Minggirsari tanggal 10 Juli 2020, bersih-bersih Sungai Glondong pada tanggal 23 Desember 2020 bersama Perum Jasa Tirta, dan 4) gerakan PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yaitu evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah B3. Program ini juga didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang melalui program pengendalian dan kepatuhan tata ruang sesuai dengan RT/RW daerah.

Untuk capaian kinerja indikator Ketaatan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melakukan berbagai kegiatan pengendalian baik melalui bentuk fasilitasi dan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang maupun penerbitan dokumen yang berisi pengendalian tata ruang, dengan capaian kinerja kegiatan 100%. Kebijakan yang mendukung IKLH adalah tentang pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini baru tercapai 1,3% dari ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 20%. Namun demikian, angka capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berkisar 1,1% dari seluruh wilayah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus memberikan perhatian yang lebih besar pada pengendalian tata ruang ini dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan segera menyusun master plan pemenuhan Rung Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang. Realisasi atas program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran	

	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Dinas Lingkungan Hidup	7.703.084.057	7.443.716.537,89	96,63%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	464.230.000	386.044.084	83,20%
Serapan Anggaran	**8.167.314.057**	**7.829.760.621,89**	**95,87%**

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Strategis 12

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2019	Capaian 2020			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi	Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase desa berstatus pratama (%)	0,45	0	0	100%	-	0
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**100%**		

Capaian kinerja sasaran strategis dari Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa adalah 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki 220 pemerintahan desa yang tersebar di 22 Kecamatan. Capaian kinerja pemberdayaan terus meningkat setiap tahun, sehingga banyak desa yang mulai menuju desa maju dan mendiri. Desa berstatus pratama tahun 2020 sudah tidak ada lagi atau 0% dari seluruh desa. Dari 220 desa tersebut, sebagian besar merupakan desa maju dengan jumlah desa sebanyak 149 desa atau 64,78%, disusul oleh desa berkembang sebanyak 73 desa atau 31,74% dan sisanya adalah 8 desa (3,48%) sudah masuk kategori Desa sudah Mandiri.

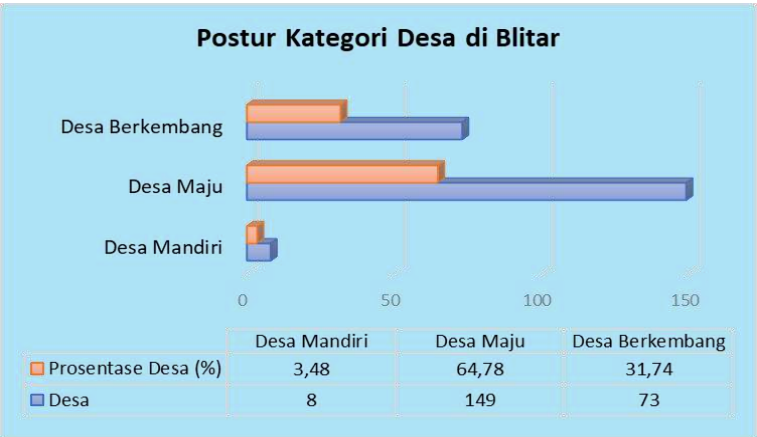

Pembangunan desa terus berkembang yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktif lembaga desa seperti Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, PKK, Karang Taruna dan bahwa LSM, dan membangun menjadi Desa Siaga Aktif. Partisipasi ekonomi terus meningkat dari warganya yang ditunjukkan makin meningkatnya Swadaya Masyarakat di Program Pemberdayaan Masyarakat yang tahun 2019 mencapai Rp.3.990,6 Juta dan malampaui target Rp.3.430,2 juta dan pada tahun 2020 ini ditargetkan terus meningkat setiap tahun.

Pada bidang politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terus berusaha melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Blitar. Salah satu inovasi tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan sistem aplikasi online disebut Sistem Informasi Pilkades Kabupaten Blitar. Sistem ini memungkinkan setiap pemilih di Pilkades untuk melakukan proses pemilihan dari rumah. Sehingga, proses protokol kesehatan dari covid-19 dapat dilakukan dengan maksimal.

Perangkat Daerah pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ini yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, dengan realisasi program-program sebagai berikut:

Perangkat Daerah	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.405.117.838	13.777.652.397	95,64%
Bagian Pemerintahan	1.567.090.000	1.567.090.000	100,00%
Serapan Anggaran	**15.972.207.838**	**15.344.742.397**	**97,82%**

Tabel
Program dan Anggaran Kabupaten Blitar Tahun 2021

Program		Anggaran (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	134.623.123.850
2.	Program Pengembangan Kurikulum	554.296.550
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.036.137.700
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	88.389.800
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	197.383.984.994
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	677.420.000
7.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	637.314.000
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	231.050.000

Program		Anggaran (Rp.)
9.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.161.308.000
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	26.522.551.250
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	7.829.153.350
12.	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	379.275.300
13.	Program Penyelenggaraan Jalan	70.882.535.476
14.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	184.859.000
15.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	670.489.300
16.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.086.242.170
17.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15,135,629,000
18.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,487,751,338
19.	Program Pengembangan Permukiman	16,389,691,954
20.	Program Pengembangan Perumahan	327,316,700
21.	Program Kawasan Permukiman	10,260,267,340
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	15,021,623,274
23.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	640,432,000
24.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,770,150,000
25.	Program Penatagunaan Tanah	440,039,400
26.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1,753,014,750
27.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanggulangan Bencana	338,247,850
28.	Program Penanggulangan Bencana	2,424,196,910
29.	Program Pemberdayaan Sosial	3,118,599,600
30.	Program Rehabilitasi Sosial	1,205,933,130
31.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,139,960,000
32.	Program Penanganan Bencana	2,003,797,875
33.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	23,400,000
34.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	650,969,025
35.	Program Penempatan Tenaga Kerja	2,026,993,500
36.	Program Hubungan Industrial	386,209,500
37.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	134,977,275
38.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	75,092,000
39.	Program Perlindungan Perempuan	314,597,050
40.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	55,823,200
41.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	6,199,750
41.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	25,115,335

Program		Anggaran (Rp.)
43.	Program Perlindungan Khusus Anak	335,712,000
44.	Program Pengendalian Penduduk	166,270,400
45.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8,343,385,000
46.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	61,282,330
47.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	506,110,000
48.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	870,233,400
49.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	40,000,000
50.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	60,000,000
51.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10,303,717,639
52.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13,910,133,360
53.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	731,952,000
54.	Program Penyuluhan Pertanian	6,923,478,000
55.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	186,765,500
56.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	324,175,000
57.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	11,698,680,000
58.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	245,221,000
59.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,341,751,000
60.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20,781,000
61.	Program Pengelolaan Persampahan	4,686,919,100
62.	Program Pendaftaran Penduduk	1,054,630,500
63.	Program Pencatatan Sipil	283,495,000
64.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,374,692,700
65.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	2,334,000
66.	Program Penataan Desa	259,550,000
67.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	679,784,000
68.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7,348,797,600
69.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,008,751,350
70.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,405,135,500
71.	Program Aplikasi Informatika	5,570,083,250
72.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	269,556,200
73.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	6,175,750
74.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	85,578,400

Program		Anggaran (Rp.)
75.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	249,999,800
76.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	250,000,000
77.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	991,181,000
78.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	585,578,400
79.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	850,190,000
80.	Program Pengembangan Umkm	845,000,000
81.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	199,750,750
82.	Program Promosi Penanaman Modal	404,394,000
83.	Program Pelayanan Penanaman Modal	110,723,300
84.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	496,730,600
85.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38,786,750
86.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	492,110,000
87.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,943,310,000
88.	Program Pengembangan Kebudayaan	1,355,425,850
89.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	55,143,000
90.	Program Pengelolaan Permuseuman	659,999,750
91.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	902,519,750
92.	Program Pemasaran Pariwisata	1,003,695,320
93.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	915,667,600
94.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	510,000,000
95.	Program Pembinaan Perpustakaan	367,344,800
96.	Program Pengelolaan Arsip	355,354,500
97.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	3,685,800
98.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	346,523,250
99.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,783,071,750
100.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,881,134,240
101.	Program Perizinan Usaha Pertanian	30,000,000
102.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	258,707,400
103.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,877,940,750
104.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Brg Penting	45,782,600
105.	Program Pengembangan Ekspor	590,431,800
105.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	192,196,500

Program		Anggaran (Rp.)
107.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	188,325,000
108.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	622,420,400
109.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	100,000,000
110.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	322,720,425
111.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5,656,806,800
112.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,817,346,800
113.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	11,236,036,400
114.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,537,607,200
115.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,175,106,100
116.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,078,337,000
117.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	377,650,267,859
118.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	852,955,000
119.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,400,472,200
120.	Program Kepegawaian Daerah	2,712,438,400
121.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,563,588,400
122.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,431,256,000
123.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,024,389,000
124.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	615,512,500
125.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik	1,453,019,400
126.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	393,210,000
127.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	470,270,000
128.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	955,064,000
129.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	208,234,547
130.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	284,213,200
131.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	822,617,900
132.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	869,355,200
133.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15,453,805,621
134.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,190,225,496,441
	TOTAL	**2.314.922.540.528**

2.3.4 Analisis Efisiensi Pengunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai.

Analisis Efisiensi Kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan perangkat daerah pendukung. Hasil rekapitulasi capaian kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

Tabel
Efisiensi Pengunaan Sumber Daya
Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	8,65	9,65	**75,97%**	22.207.982.604	19.842.363.092	**95,86%**	**-19,89**
		2. Pendapatan per kapita (juta rupiah)	40,35	30,07					
		3. Indeks Daya Beli	0,7266	0,7266					
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,46	3,66					
2.	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	5. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	96,74	91,51	**94,59%**	199.083.182.356	186.752.046.215	**95,04%**	**-0,45**
3.	Terwujudnya stabilitas wilayah	6. Persentase penanganan konflik (%)	100%	100%	**97,50%**	14.777.766.232	13.759.525.933	**93,63%**	**3,87**
		7. Persentase penegakan PERDA (%)	100%	95%					
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan	8. Indeks Pendidikan	0,66	0,66	**100%**	169.760.620.847	169.651.368.824	**99,94%**	**0,06**

	pendidikan masyarakat								
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Indeks Kesehatan	0,8220	0,8220	**100%**	524.410.334.483	444.076.497.571	**79,17%**	**20,83**
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindngan anak	10. Indeks Pemberdayaan Gender	78,50	79,04	**100,69%**	862.539.335	486.613.320	**91,03%**	**9,66**
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pem daerah	11. Nilai SAKIP	A	B	**85,72%**	402.130.319.504	379.933.996.688	**93,88%**	**-8,16**
		12. Nilai LPPD	3,0540	3,0624					
		13. Opini BPK	WTP	WTP					
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14. Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sangat Baik	Baik	**75%**	168.430.001.467	168.034.506.773	**91,82%**	**-16,82**
9.	Meningkatnya produktivitas usaha	15. Persentase Pertumbuhan Sektor	7,23%	4,45	**69,61%**	24.299.036.387	22.640.787.454	**93,68%**	**-24,07**

	masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	Perdagangan terhadap PDRB (%)							
		16. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	7,78%	4,69					
		17. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	3%	1,66%					
		18. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)	5.742.647	5.814.832					
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	19. Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	**100%**	4.670.070.190	4.293.984.143	**91,95%**	**8,05**
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71	65,53	**96,15%**	14.423.405.303	13.639.165.756	**97,15%**	**-1**
		21. Persentase Ketaatan Tata Ruang	85	85					

12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	22. Persentase desa berstatus pratama (%)	0	0	**100%**	15.972.207.838	15.344.742.397	**97,82%**	**2,18**
Efisiensi (Inefisiensi) Kinerja									**-39,1**

Selama 2021 berbagai prestasi berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai capaian kinerja Pemerintah Daerah. Prestasi tersebut antara lain:

1. Penerimaan Penghargaan Juara I Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional,
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 (5x berturut-turut)
3. DAR DER DOR berhasil memenangkan beberapa lomba inovasi seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur yang berhasil mendapatkan juara 2 dari 30 besar peserta di Jawa Timur,
4. Disabet 3 Penghargaan Festival TIK Nasional (Pengelola Sosial Media Terbaik, Tata Kelola Organisasi dan Program Pemberdayaan Desa).
5. Penghargaan Smart City Kategori Smart Goverment.
6. Penghargaan Top Digital Award.
7. Juara III Durian favorit pada acara festival durian provinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Juara Stand kategori komoditi khusus pada acara APKASI EXPO tahun 2021 di Jakarta.
9. Mendukung Program OPOP.
10. Lomba UKM berprestasi kategori Ecogreen (UKM Turi Putih)
11. Juara I Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur
12. Juara II Lomba PKK Tingkat Propinsi Jawa Timur
13. Juara IV Lomba BBGRM Tingkat Propinsi Jawa Timur
14. Juara Harapan I Lomba BUM Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur
15. Penerimaan Penghargaan Lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga [PKK] Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Juara II).
16. Penerimaan Penghargaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Juara IV)
17. Penerimaan Penghargaan Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Juara Harapan I).

BAB III

CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 Ayat (1) bahwa pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya Penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia, dimana kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) yang

ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan wujud sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Blitar tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian. Adapun dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan yaitu:

1. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410) ;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai

Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2019 tentang Klinik Badan Usaha Milik Desa;Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 III-2;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Jawa Timur.
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2019 tentang Klinik Badan Usaha Milik Desa ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur ;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka

Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur .

3.1 TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA

Pada Tahun 2021 tidak ada Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4. Dasar Hukum

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta mayarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Adapun dasar hukum penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah

Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

4.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pemerintah dilaksanakan oleh Pendidikan pada tahun 2021 melalui 15 Program dan 72 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.941.599.541,99 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 753.820.745.070,05 (98,42%).

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Tabel
Jenis Pelayanan Dasar
Urusan Pendidikan Tahun 2021

1	**Pendidikan Anak Usia Dini**					
			Jumlah total yang harus dilayani	**Jumlah total yang terlayani**	**yang belum terlayani**	**Total Pencapaian**
	1	Jumlah yang harus Dilayani	33788	31827	1961	94.20 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	
	2	Buku Gambar	31827	31827	0	100 %
	3	Alat mewarnai	31827	31827	0	100 %
	4	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	759	238	521	31.36%
	5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	21506400000	19127100000	2379300000	88.94 %
	6	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	638	638	0	100.00 %
	7	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1136	1136	0	100.00 %
	8	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	759	759	0	100 %

2	**Pendidikan Dasar**					
			Jumlah total yang harus dilayani	**Jumlah total yang terlayani**	**yang belum terlayani**	**Total Pencapaian**
	1	Jumlah yang harus Dilayani	162556	144460	18096	88.87 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	
	2	Buku Teks Pelajaran	144460	144460	0	100%
	3	Perlengkapan Belajar	144460	144460	0	100%
	4	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	763	569	194	74.57 %
	5	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	763	632	131	82.83 %
	6	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	779	679	100	87.16 %
	7	satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	779	679	100	87.16 %
	8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1452106000	1437280000	14826000	98.98 %
	9	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	6650	6650	0	100%
3	**Pendidikan Kesetaraan**					
			Jumlah total yang harus dilayani	**Jumlah total yang terlayani**	**yang belum terlayani**	**Total Pencapaian**
	1	Jumlah yang harus Dilayani	24869	707	24162	2.84 %
			Jumlah Mutu Barang	**Jumlah Mutu Barang /**	**Barang / Jasa Yang**	

			/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Belum Tersedia	
	2	Modul Belajar	707	707	0	100%
	3	Perlengkapan Belajar	707	707	0	100%
	4	Jumlah rombongan belajar di PKBM	6	6	0	100%
	5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	7260800000	7260800000	0	100%
	6	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7	7	0	100%
	7	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	6	2	4	33.33 %
	8	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	6	2	4	33.33 %
	9	PKBM Terakreditasi minimal C	6	2	4	33.33 %

4.1.2 Alokasi Anggaran

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel
Realisasi Anggaran dan Kegiatan
Urusan Pendidikan Tahun 2021

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat	I Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	94,87	944.901.000	896.452.500
	1 Seleksi dan Fasilitasi Kepesertaan Even Pendidikan Jenjang PAUD dan PNF	99,8	112.723.250	112.544.750
	2 Fasilitasi Peningkatan Mutu Kurikulum dan	99,8	90.824.000	90.657.200

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
		Penilaian PAUD dan PNF			
	3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	89,66	382.922.500	343.337.300
	4	Penyelenggaraan BOP Madrasah Diniyah (Madin)	100	100.000.000	100.000.000
	5	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	97,25	226.243.750	220.025.750
	6	Fasilitasi perizinan,perubahan dan penghapusan kelembagaan PAUD PNF	92,85	32.187.500	29.887.500
	II	Program Pendidikan Sekolah Dasar	98,95	79.247.181.859 ,72	78.414.977.752, 67
	1	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah	99,27	155.425.000	154.285.600
	2	Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SD	86,20	16.531.000	14.250.000
	3	Seleksi dan Fasilitasi Kepesertaan Even Pendidikan	100	115.774.200	115.198.200
	4	Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD	97,89	24.477.900	23.961.900
	5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SD	96,92	13.720.165.460	13.297.851.500
	III	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	99,11	48.035.420.936 ,27	47.606.735.020, 38
	1	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional	99,06	370.899.000	367.404.000
	2	Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SMP	98,49	219.775.000	216.450.000
	3	Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SMP	96,30	156.450.000	150.663.250
	4	Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SMP	96,30	156.450.000	150.663.250

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	5 Seleksi dan Fasilitasi Kepesertaan Even Pendidikan Jenjang SMP	86,65	77.300.000	66.980.000
	6 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SMP	99,83	79.650.000	79.512.000
	7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SMP	98,26	11.721.502.062	11.517.541.600
	8 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	99,43	35.409.844.873 ,38	35.208.184.170, 38
	VII Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	99,46	790.961.500	786.720.700
	1 Fasilitasi Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan	99,63	529.828.500	527.858.500
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik	VII I Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	98,05	24.057.583.500	23.587.709.262
	1 Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar	95,27	131.062.500	124.861.900
	2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	82,96	961.230.000	797.448.000
	3 Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD, Pendidikan Non Formal Dan SMP	99,51	123.700.000	123.100.000

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2021.

4.1.3 Dukungan Personil

4.1.4 Permasalahan dan Solusi

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan pendidikan, khususnya tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Komite Sekolah.

2. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan khususnya guru tidak tetap, dan pemerataan penyebaran dan penataan tenaga guru masih belum optimal di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
3. Belum maksimalnya pemenuhan pembiayaan operasional beberapa SD dan SMP, serta pemenuhan biaya tenaga guru dan biaya sarana prasarana.
4. Masih beragamnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah daerah dan sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK, Perijinan kelembagaan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
5. Perpustakaan belum memiliki tenaga fungsional pustakawan yang memiliki keahlian dan kompetensi mengelola perpustakaan, sehingga Perpustakaan umum daerah yang belum bisa diusulkan terakreditasi.
6. Infrastruktur penyelenggaraan pelayanan perpustakaan secara online dan alih media buku elektronik masih sangat berbatas, sehingga akses masyarakat terhadap berbagai bahan bacaan dan pelayanan lebih lama dan lambat.
7. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan desa masih rendah.

Strategi/solusi yang telah diambil dalam mencapai sasaran strategis, antara lain:

1. Intensifikasi sosialisasi dan pemberdayaan komite sekolah melalui fasilitasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar terus ditingkatkan.
2. Melaksanakan pemetaan guru per sekolah serta redistribusi guru sehingga kebutuhan guru sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memprioritaskan kebutuhan guru di daerah terpencil dengan memenuhi fasilitasi dan jaminan hidupnya.
3. Memanfaatkan BOS Affirmasi untuk menopang kebutuhan sekolah yang tidak terakomodir dalam BOS reguler.
4. Sosialisasi dan pendampingan ke lembaga terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi dan perijinan sekolah.
5. Mengusulkan formasi tenaga fungsional pustakawan dan perpustakaan

daerah segera diusulkan akreditasi.

6. Peningkatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dalam pengembangan layanan online dan akses sumber bacaan digital dilakuka secara bertahap.
7. Sosialisasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat desa dalam pengembangan perpustakaan desa (taman bacaan masyarakat) terus dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

4.2. Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pada 2021 Dinas Kesehatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 125.080.406.211 dan dapat direalisasikan 138,22% atau sebesar Rp. 172.883.174.171,08. Capaian tersebut dihitung setelah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp. 47.802.767.960,08 melalui 7 program dan 62 kegiatan.

Sementara, RSUD melalui 3 program dan 4 kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategisnya "Meningkatnya pelayanan rujukan yang paripurna" merealisasikan 152,03% dari alokasi anggaran atau sebesar Rp. 130.746.575.730,48 dari Rp. 86.000.000.000. Pelampauan realisasi keuangan tersebut disebabkan karena adanya tambahan anggaran sebesar Rp. 44.746.575.730,48 pada tahun 2021.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Tabel
Jenis Pelayanan Dasar
Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3	4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. BLITAR		85.29%
1 .	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**	**Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan**	91.08%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**82.17%**
		17,133	14,078	**3,055**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Buku KIA	14,078.00	14,078.00	**0**	**100.00%**
	2 . Tablet Tambah Darah	14,078.00	14,078.00	**0**	**100.00%**
	3 . Vaksin Tetasus Difetri (Td)	14,078.00	14,078.00	**0**	**100.00%**
	4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	14,078.00	14,078.00	**0**	**100.00%**
	5 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	14,078.00	14,078.00	**0**	**100.00%**
2 .	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**	**Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan**			89.54%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**79.08%**
		16,354	12,932	**3,422**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	12,932.00	12,932.00	**0**	**100.00%**
	2 . Buku KIA	12,932.00	12,932.00	**0**	**100.00%**
	3 . Formulir Photograf	12,932.00	12,932.00	**0**	**100.00%**
3 .	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**	**Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan**			94.42%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**88.85%**
		15,575	13,838	**1,737**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Vaksin Hepatitis BO	13,838.00	13,838.00	**0**	**100.00%**
	2 . Vitamin K1 Injeksi	13,838.00	13,838.00	**0**	**100.00%**
	3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik	13,838.00	13,838.00	**0**	**100.00%**
	4 . Formulir Bayi Baru Lahir	13,838.00	13,838.00	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Formulir MTBM	13,838.00	13,838.00	**0**	**100.00%**
	6 . Buku KIA	13,838.00	13,838.00	**0**	**100.00%**
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan**			99.23%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**98.47%**
		64,104	63,122	**982**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Formulir DDTK	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
	2 . Buku KIA	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
	3 . Vitamin A Biru	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
	4 . Vitamin A Merah	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
	5 . Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
	6 . Jarum Suntik dan BHP	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
	7 . Peralatan Anafilaktik	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
	8 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
	9 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	63,122.00	63,122.00	**0**	**100.00%**
5 .	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**	**Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan**			67.21%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**34.41%**
		138,988	47,826	**91,162**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Buku Raport Kesehatanku	47,826.00	47,826.00	**0**	**100.00%**
	2 . Buku Pemantauan Kesehatan	47,826.00	47,826.00	**0**	**100.00%**
	3 . Kuesioner Skrining Kesehatan	47,826.00	47,826.00	**0**	**100.00%**
	4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	47,826.00	47,826.00	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	47,826.00	47,826.00	**0**	**100.00%**
6 .	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**	**Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**			75.90%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**51.79%**
		714,667	370,143	**344,524**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	370,143.00	370,143.00	**0**	**100.00%**
	2 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	370,143.00	370,143.00	**0**	**100.00%**
7 .	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**	**Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**			89.90%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**79.81%**
		217,809	173,831	**43,978**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	173,831.00	173,831.00	**0**	**100.00%**
	2 . Buku Kesehatan Lansia	173,831.00	173,831.00	**0**	**100.00%**
	3 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	173,831.00	173,831.00	**0**	**100.00%**
8 .	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**	**Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan**			64.70%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**29.41%**
		361,801	106,400	**255,401**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	106,400.00	106,400.00	**0**	**100.00%**
	2 . Tensimeter	106,400.00	106,400.00	**0**	**100.00%**
	3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	106,400.00	106,400.00	**0**	**100.00%**
9 .	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**	**Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan**			98.12%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**96.25%**
		24,196	23,288	**908**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	23,288.00	23,288.00	**0**	**100.00%**
	2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	23,288.00	23,288.00	**0**	**100.00%**
	3 . Pedoman dan Media KIE	23,288.00	23,288.00	**0**	**100.00%**
10 .	**Pelayanan kesehatan 0rang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat**	**Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan**			97.93%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**95.85%**
		2,219	2,127	**92**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	2,127.00	2,127.00	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2,127.00	2,127.00	**0**	**100.00%**
	3 . Media KIE	2,127.00	2,127.00	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2,127.00	2,127.00	**0**	**100.00%**
11 .	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**	**Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan**			71.51%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**43.02%**
		11,404	4,906	**6,498**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	4,906.00	4,906.00	**0**	**100.00%**
	2 . Reagen Zn TB	4,906.00	4,906.00	**0**	**100.00%**
	3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	4,906.00	4,906.00	**0**	**100.00%**
	4 . Catridge Tes Cepat Molekuler	4,906.00	4,906.00	**0**	**100.00%**
	5 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan	4,906.00	4,906.00	**0**	**100.00%**
	6 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur	4,906.00	4,906.00	**0**	**100.00%**
	7 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	4,906.00	4,906.00	**0**	**100.00%**
12 .	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)**	**Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan**			83.94%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**67.88%**
		20,720	14,064	**6,656**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	14,064.00	14,064.00	**0**	**100.00%**
	2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	14,064.00	14,064.00	**0**	**100.00%**
	3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	14,064.00	14,064.00	**0**	**100.00%**

4.1.2 Program dan Kegiatan

Tabel
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Kesehatan Kabupten Blitar Tahun 2021

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**93,11**	**4.369.937.450**	**4.069.030.558,05**
		Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	90,02	2.949.835.450	2.655.339.178
		Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)		100%	100%
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**99,55**	**1.420.102.000**	**1.413.691.380**
		Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90,55	1.223.607.500	1.108.016.628
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**30,43**	**288.162.500**	**87.681.500**

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	56,66	33.000.000	18.698.500
		Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	100,00	7.000.000	7.000.000
		Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan	24,98	248.162.500	61.983.000
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	**84,61**	62.813.064.537	**53.145.331.480**
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	81,87	801.625.000	656.326.732
		Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)	42,13	1.722.640.000	725.785.237
		Jaminan Kesehatan Kabupaten	96,98	23.393.655.029	22.687.586.824
		Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan	87,87	797.847.008	701.037.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	98,27	992.219.200	975.020.829
		Pelayanan Kesehatan Tradisiona	99,49	412.802.500	410.702.500
		Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit Baru	68,61	21.154.775.800	14.514.474.641
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Saki	93,28	4.687.500.000	4.372.360.317
		Penyedian / Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	78,34	433.102.000	339.299.682
		Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena	99,99	2.900.898.000	2.900.543.000

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Pemutusan Hubungan Kerja.			
		elayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif/Preventif maupun Kuratif/ Rehabilitatif	88,15	5.516.000.000	4.862.194.717
		Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	92,46	51.925.766.654	48.011.041.558
		Pelayanan Kefarmasian dan BMHP	80,91	7.769.787.500	6.286.451.528
		Pengadaan Obat (DAK)	92,27	4.271.588.616	3.941.354.870
		Pelayanan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK)	83,40	94.042.000	78.432.137
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	96,69	33.438.792.043	32.333.370.805
		Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	84,79	5.390.518.995	4.570.743.816
		Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	83,32	961.037.500	800.688.402
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	93,07	24.668.344.000	22.958.707.992
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	99,68	866.935.000	864.175.000
		Jampersal (DAK)	99,48	3.105.739.000	3.089.611.607
		Peningkatan Pelayanan Gizi Masyaraka	99,82	1.180.340.000	1.178.215.000
		Pelayanan Laboratorium Kesehatan	84,62	251.050.000	212.436.000
		Peningkatan Kesehatan Lingkungan	87,89	979.495.250	860.901.750
		Pelayanan Kesehatan Kerja	95,54	84.150.000	80.400.000
		Pembinaan Kesehatan Olahraga	76,12	120.375.000	91.625.000
		Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengembangan UKBM	88,90	769.915.750	684.426.750
		Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)	22,02	225.000.000	49.545.000
		Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	92,75	17.085.344.000	15.847.371.885
		Program Pencegahan dan Penanggulangan	**89,36**	**10.236.051.250**	**9.146.832.245**

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Penyakit Menular dan Tidak Menular			
		Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan Wabah dan Bencana	95,57	2.128.502.500	2.034.158.668
		Peningkatan Imunisasi	65,37	132.665.000	86.718.000
		Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	84,41	283.165.000	239.026.000
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	54,00	173.055.000	93.442.000
		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	89,02	7.518.663.750	6.693.487.577

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2021.

4.2.3 Dukungan Personil

4.2.4 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit baik melalui imunisasi dan pola hidup bersih masih kurang. Bahkan di beberapa desa, masih ada warga yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan adanya kontra indikasi bahwa anak akan menderita penyakit auto imun, dll.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular karena faktor pendidikan, sosial ekonomi, dan pekerjaan;
3. Belum semua desa memiliki Posbindu PTM dan Posbindu KIT, dan Belum adanya dukungan anggaran Desa untuk pengadaan BHP penunjang skrining PTM;
4. Masih adanya keterbatasan SDM kesehatan dalam pelayanan.
5. Masih banyaknya stigma buruk terhadap ODGJ baik dari keluarga dan masyarakat;
6. Tingkat pendidikan, pemahaman serta status sosial ekonomi keluarga penderita masih kurang, dengan menganggap obat dari Puskesmas kurang berkhasiat dan membeli obat sendiri di apotek serta memilih pengobatan alternatif, namun tidak dilakukan secara rutin dan terus menerus. Sedangkan penderita ODGJ rentan untuk kambuh kembali ketika tidak mengkonsumsi obat secara rutin;

7. Belum adanya Pengawas Minum Obat bagi ODGJ di wilayah kerja puskesmas.
8. Masih minimnya dukungan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan di IGD dan ICU sehingga berdampak pada masih tingginya angka kematian kasar.

Solusi :

1. Sosialisasi secara intensif baik langsung maupun kerjasama dengan pemerintahan desa dan kelompok masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap masayarakat.
3. Penguatan rujukan berjenjang dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengaktikan PSC.
4. Perbaikan mutu pelayanan life saving di IGD dan melaksanakan pelatihan ACLS bagi seluruh tenaga medis agar memahami penanganan kegawatdaruratan pada jantung.
5. Digitalisasi pelayanan dinkes terdiri dari Lapak Dinkes, Iso konsul dan Satrio. Lapak Dinkes merupakan portal pelayanan dinkes berbasis web. Ada 9 pelayanan yang ada di lapak dinkes, antara lain : rekomendasi izin penelitian, rekomendasi perizinan apotik, rekomendasi surat terdaftar penyehat tradisional, rekomendasi griya sehat, penerbitan sertifikat penyuluh keamanan pangan, perizinan praktik tenaga Kesehatan, perizinan toko obat berizin, perizinan usaha mikro obat tradisional. Lapak dinkes dapat di akses melalui https://lapakdinkes.blitarkab.go.id/.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada awal tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 108.201.366.639,00 akibat pandemi wabah virus Corona, kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 102.354.839.687 atau 94,60%.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Tabel
Jenis Pelayanan Dasar
Urusan Pekerjaan Umum 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
-1	-2	-3			-4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. BLITAR				88.80%
1 .	**Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari**			91.38%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**82.76%**
		416,567	344,745	**71,822**	
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	**Jumlah warga negara yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	416,567.00	416,567.00	**0**	**100.00%**
	2 . Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	71,822.00	71,822.00	**0**	**100.00%**
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**			86.22%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**72.43%**
		416,567	301,725	**114,842**	
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	**Jumlah warga negara yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	83	83	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
	2 . Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masayarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	168	168	**0**	**100.00%**
	3 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	83	83	**0**	**100.00%**

4.3.2 Program dan Kegiatan

Uraian Program /Kegiatan		Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
(2)		(3)	(4)	(5)
I.	**Program pelayanan Administrasi Perkantoran**	99,04	1.568.199.911	1.553.091.417
	Kegiatan Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	99,04	1.568.199.911	1.553.091.417
II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	97,35	478.121.500	465.468.365
	Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,35	478.121.500	465.468.365
III.	**Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**	98,23	203.600.000	200.000.106
	Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	98,23	203.600.000	200.000.106
I.	**Program Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan**	96,57	42.579.485.736	41.120.291.591
	1. Kegiatan Pembangunan Jalan	99,30	1.412.070.000	1.402.158.000
	2. Kegiatan Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop)	100	76.314.000	76.314.000
	3. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	99,97	2.367.820.000	2.367.190.750
	4. Kegiatan Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Utara)		0	0
	5. Kegiatan Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Selatan)	82,41	262.856.904	216.625.000
	6. Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten	95,01	24.218.439.069	23.010.877.341
	7. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	98,63	14.241.985.763	14.047.126.500

Uraian Program /Kegiatan		Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
(2)		(3)	(4)	(5)
II.	**Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan**	87,20	14.699.252.008	12.817.798.608
	1. Kegiatan Pembangunan Jembatan	73,60	6.710.161.848	4.938.494.000
	2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	99,64	6.289.090.160	6.266.304.408
	3. Kegiatan Rehabilitasi Infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat	94,88	1.700.000.000	1.613.000.200
III.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	99,05	15.880.212.570	15.729.766.091
	1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat	96,40	135.000.000	130.139.641
	2. Kegiatan Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun	98,85	3.220.600.000	3.183.403.150
	3. Kegiatan Pemelharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun	99,78	806.350.000	804.538.800
	4. Kegiatan Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong	99,09	11.718.262.570	11.611.684.500
IV.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**	90,29	18.997.249.000	17.152.075.544
	1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	99,72	764.250.000	762.080.000
	2. Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	74,93	6.393.919.000	4.790.680.662
	3. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan irigasi	97,32	6.540.260.000	6.364.871.812
	4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi		0	0
	5. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai	98,79	5.279.902.720	5.215.848.720
V.	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur**	94,80	**1.600.000.000**	**1.516.795.000**
	1. Penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi melalui penyediaan/pemeliharaan saluran irigasi	94,80	1.600.000.000	1.516.795.000
VI.	**Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan**	98,36	**3.875.205.914**	**3.811.639.114**
	1. Pembangunan / Rehabilitasi dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan	98,36	3.875.205.914	3.811.639.114
VII	**Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	83,16	**464.230.000**	**386.044.084**
	1. Kegiatan Fasilitasi Penataan Tata Ruang	94,20	342.285.000	322.449.084
	2. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	52,15	121.945.000	63.595.000

4.3.3 Dukungan Personil

4.3.4 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan;
2. Perlunya peningkatan skill / kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan;
3. Perlunya penyusunan Manual O & P sebagai standart pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA);
4. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan;
5. Perlunya pembentukan organisasi/kelembagaan yang mewadahi pengelolaan sumber daya air (seperti HIPPA/P3A, Komir) di wilayah Kabupaten Blitar;
6. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air
7. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Solusi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
2. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan;
3. Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan

termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi;

4. Penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, pembentukan Komir, re-organisasi HIPPA/P3A dan penyusunan Manual O&P.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tujuh) Program dan 11 (delapan belas) Kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp 46.660.552.620 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 46.138.325.457 (98,88%).

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Tabel
Jenis Pelayanan Dasar
Urusan Perumahan Rakyat 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
-1	-2	-3			-4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. BLITAR				91.67%
1 .	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni**			100.00%
		Tidak Terjadi Bencana (Tidak Akan Masuk Kedalam Perhitungan)			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		3	3	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	3	3	**0**	**100.00%**
	2 . Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	3	3	**0**	**100.00%**
	3 . Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	3	3	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
	4 . Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	3	3	**0**	**100.00%**
2 .	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**	**Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**			83.34%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		3	3	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**66.67%**
	1 . Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	3	2	**1**	**66.67%**
	2 . Subsidi Uang Sewa	3	2	**1**	**66.67%**
	3 . Penyediaan Rumah Layak Huni	3	2	**1**	**66.67%**

4.4.2 Program dan Kegiatan

Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Pengembangan Perumahan	**89,70**	**439.497.500**	**394.231.388**
1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	81,92	218.815.500	179.258.438
2. Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya	98,75	198.667.000	196.191.950
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan	77,58	12.265.000	9.515.000
4. Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal	95,04	9.750.000	9.266.000
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	**99,07**	23.060.857.350	22.845.824.614
1. Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih	99,68	2.649.380.600	2.640.922.245
2. Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik		0	0
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)	99,89	9.724.158.000	9.713.185.619
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan	97,79	6.970.869.500	6.816.631.550
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK	98,89	3.716.449.250	3.675.085.200
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	99,04	12.812.105.100	12.689.575.000
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman	99,14	10.283.977.100	10.195.630.000

Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2. Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh	98,65	2.528.128.000	2.493.945.000

4.4.3 Dukungan Personil

4.4.4 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada perangkat daerah pengampu SPM memahami tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penereapan SPM;
2. Kabupaten Blitar memiliki zona rawan bencana dikarenakan kondisi topografi yang pegunungan dan wilayah pantai serta gunung berapi;
3. Banyak masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.
4. Anggaran yang ditetapkan kurang memenuhi sesuai kebutuhan.
5. Belum ada perencanaan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten yang dianggarkan.

Solusi permasalahan tersebut adalah :

1. Menganggarkan alokasi dana untuk peningkatan kualitas ataupun pembangunan baru rumah khususnya akibat adanya bencana alam dan relokasi program pemerintah.
2. Selain menggunakan dana APBD usulan bantuan perbaikan rumah bisa diusulkan melalui APBN yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2021 SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut melalui 7 program dan 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.187.175.804 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.446.438.765 atau (92,73 %).

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
-1	-2	-3			-4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. BLITAR				91.84%
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi**	**Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi**			100.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,242,207	1,242,207	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	**0**	**100.00%**
	2 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	**0**	**100.00%**
2 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu**	**Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu**			98.52%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,242,207	1,242,207	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**97.04%**
	1 . Penegakan Perda sesuai SOP	129	129	**0**	**100.00%**
	2 . Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	135	129	**6**	**95.56%**
	3 . Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	135	129	**6**	**95.56%**
3 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				100.00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,242,207	1,242,207	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,242,207.00	1,242,207.00	**0**	**100.00%**
4 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**				100.00%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,242,207	1,242,207	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	**0**	**100.00%**
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	31,199.00	31,199.00	**0**	**100.00%**
	3 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	31,199.00	31,199.00	**0**	**100.00%**
	4 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	4	4	**0**	**100.00%**
	5 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	3	3	**0**	**100.00%**
5 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				93.42%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1,790	1,790	**0**	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**86.84%**
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1,790.00	1,790.00	**0**	**100.00%**
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1,790.00	1,790.00	**0**	**100.00%**
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	**0**	**100.00%**
	4 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	**0**	**100.00%**
	5 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	1	1	**0**	**100.00%**
	6 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	95	20	**75**	**21.05%**
6 .	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				59.09%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**72.73%**
		22	16	**6**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**45.46%**
	1 . Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	22	16	**6**	**72.73%**
	2 . Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	22	4	**18**	**18.18%**

4.5.2 Program dan Kegiatan

Uraian Program/Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96,90	30.195.000	29.259.500
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96,90	30.195.000	29.259.500
II. Program Pemeliharaan Kantrantibmas	71,78	697.900.000	500.940.000
1. Kegiatan Patroli Wilayah Trantibum	63,56	364.150.000	231.450.000
2. Kegiatan Pengamanan , Pengawalan Pimpinan Daerah VIP serta Agenda Penting Daerah	81,81	288.700.000	236.175.000
3. Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Kegiatan Berbasis Massa	73,95	45.050.000	33.315.000
III. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	88,66	2.170.255.000	1.924.162.600
1. Penguatan Kinerja Satlinmas	0	0	0
2. Fasilitasi Pengamanan Pemilu	88,66	2.170.255.000	1.924.162.600
3. Penguatan Kinerja Potensi Masyarakat	0	0	0
IV. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	97,82	85.375.000	83.510.000
1. Pelayanan dan Pencegahan Dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran	97,82	85.375.000	83.510.000
2. Peningkatan Kualitas Anggota melalui Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0	0	0
V. Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat.	93,76	258.330.000	242.211.500
1. Koordinasi Pembinaan ASN	87,18	74.742.000	65.157.500
2. Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	100	163.966.000	169.000.000
3. Penyusunan Peraturan untuk Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan	0	0	0
4. Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pelanggaran Perda	89,72	14.588.000	13.088.000
VI. Program Mitigasi dan KesiapsiagaanMenghadapi Bencana	97,07	3.064.798.000	2.975.056.700
1. Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana	97,19	132.230.000	128.516.000
2. Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Pencegahan Bencana	97,34	2.924.218.000	2.846.540.700
VII Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	98,21	3.784.627.000	3.716.743.000
Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana	98,65	1.932.293.000	1.906.197.000
Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana	97,74	1.852.334.000	1.810.546.000

4.5.3 Dukungan Personil

4.5.4 Permasalahan dan Solusi

Masalah :

1. Jumlah aparat Satpol PP dan PPNS Satpol PP yang ada saat ini kurang mencukupi;
2. Produk hukum/perda yang belum memuat sanksi yang jelas atau sanksi belum bisa membuat efek jera atau jangka waktu sanksi yang terlalu pendek; dan
3. Terkait penampungan anjal dan gepeng dari operasi penertiban merupakan ranah Dinas Sosial (Satpol PP hanya penertiban anjal dan gepeng).
4. Perlunya penambahan sarana dan prasarana, khususnya mobil pemadam kebakaran dan mobil patroli, yang didukung dengan kesiapan jumlah personil pemadam kebakaran yang memadai;
5. Intensifikasi penyuluhan/ sosialisasi, baik melalui media massa maupun secara langsung ke masyarakat, baik terkait penegakan peraturan.
6. Permasalahan lebih di sebabkan kurangnya dukungan infrastruktur untuk pelayanan sheltering berupa pertendaan, peralatan untuk sanitasi serta dukungan peralatan untuk kegiatan searching and rescue (SAR) pencarian dan penyelamatan.

Solusi :

1. Penambahan personil Satpol PP (perekrutan Tenaga Banpol sebanyak 30 orang)
2. Rencana dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022
3. Bekerjasama dengan relawan yg bergabung dalam organisasi (IEA (Indonesia Escourt Ambulance) TRC (Tim Reaksi Cepat), “RESOB” (Relawan Sosial Blitar), Jaladri Samudro (Komunitas Pendaki)
4. Pembinaan dilakukan secara virtual

4.6. Urusan Sosial

Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 7 program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran penyelenggaraan urusan

sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.579.168.248,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.270.884.130,75 atau 95,31%.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
-1	-2	-3			-4
A.	KABUPATEN/KOTA KAB. BLITAR				91.33%
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			90.00%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		33	33	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80.00%**
	1 . Penyediaan Permakanan	7	7	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan Sandang	7	7	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan Alat bantu	0	0	**0**	**0%**
	4 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	7	7	**0**	**100.00%**
	5 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	7	7	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	7	7	**0**	**100.00%**
	7 . Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	**0**	**0%**
	8 . Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	7	7	**0**	**100.00%**
	9 . Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	7	7	**0**	**100.00%**
	10 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	**0**	**0%**
	11 . Layanan Rujukan	7	7	**0**	**100.00%**
	12 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan	1	1	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
	Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan				
	13 . Layanan Data dan Pengaduan	1	1	**0**	**100.00%**
	14 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	**0**	**100.00%**
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	**0**	**100.00%**
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			96.67%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		1	1	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**93.33%**
	1 . Layanan Data dan Pengaduan	1	1	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan Permakanan	1	1	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan Sandang	1	1	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan Alat bantu	1	1	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	1	1	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	**0**	**100.00%**
	8 . Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	**0**	**100.00%**
	9 . Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	1	1	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
	10 . Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	1	1	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	**0**	**0%**
	12 . Layanan Rujukan	1	1	**0**	**100.00%**
	13 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	**0**	**100.00%**
	14 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	**0**	**100.00%**
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	**0**	**100.00%**
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			86.67%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		5	5	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**73.33%**
	1 . Layanan Data dan Pengaduan	5	5	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	**0**	**0%**
	3 . Penyediaan Permakanan	5	5	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan Sandang	5	5	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
	5 . Penyediaan Alat bantu	5	5	**0**	**100.00%**
	6 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	5	5	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	5	5	**0**	**100.00%**
	8 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	5	5	**0**	**100.00%**
	9 . Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	**0**	**0%**
	10 . Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	5	5	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	**0**	**0%**
	12 . Layanan Rujukan	0	0	**0**	**0%**
	13 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	**0**	**100.00%**
	14 . Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	**0**	**100.00%**
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	**0**	**100.00%**
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**			93.33%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		26	26	**0**	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**86.67%**
	1 . Layanan Data dan Pengaduan	26	26	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan Permakanan	26	26	**0**	**100.00%**
	3 . Penyediaan Sandang	26	26	**0**	**100.00%**
	4 . Penyediaan Alat bantu	26	26	**0**	**100.00%**
	5 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	26	26	**0**	**100.00%**
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	26	26	**0**	**100.00%**
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	26	26	**0**	**100.00%**
	8 . Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	**0**	**0%**
	9 . Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	**0**	**0%**
	10 . Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	26	26	**0**	**100.00%**
	11 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	26	26	**0**	**100.00%**
	12 . Layanan Rujukan	26	26	**0**	**100.00%**
	13 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	1	1	**0**	**100.00%**
	14 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL CAPAIAN
	15 . Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	1	1	**0**	**100.00%**
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**			90.00%
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	**100.00%**
		154	154	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80.00%**
	1 . Penyediaan Permakanan	154	154	**0**	**100.00%**
	2 . Penyediaan Sandang	154	154	**0**	**100.00%**
	3 . Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	102	102	**0**	**100.00%**
	4 . Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	0	0	**0**	**0%**
	5 . Pelayanan Dukungan Psikososial	102	102	**0**	**100.00%**

4.5.2 Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	79,23	544.449.000	431.388.700
Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana	62,53	168.000.000	105.044.900
Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial	99,95	18.414.000	18.404.000
Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial	93,19	229.295.000	213.679.800
Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)	73,22	128.740.000	94.260.000

Program/ Kegiatan	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	99,60	304.406.500	303.179.050
Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang disabilitas dan Eks Trauma	98,58	85.325.000	84.113.500
Fasilitasi, pembinaan dan penanganan penyandang tuna sosial	100	127.174.000	127.172.300
Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti anak dan lansia	99,98	91.907.500	91.893.250
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	95,57	1.116.130.000	1.066.650.265
Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin	97,97	849.375.000	832.113.809
Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial	78,34	137.925.000	108.051.500
Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin	98,18	128.830.000	126.484.956
Program Pemberdayaan Sosial	87,42	281.737.457	246.307.910
Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	96,42	80.350.000	77.474.500
Fasilitasi peningkatan kinerja LK3	93,52	88.693.857	82.946.120
Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan	76,21	112.693.600	85.887.290

4.5.3 Dukungan Personil

4.5.4 Permasalahan dan Solusi

Masalah :

1. Jumlah bantuan yang diberikan pemerintah daerah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya kemampuan APBD dalam memberikan bantuan hanya mencapai 1% dari jumlah PMKS maka dengan adanya pandemi covid-19 menjadi meningkat. Hal ini didudukung dengan adanya refocusing anggaran, yaitu mengatur kembali fokus anggaran digunakan untuk memberikan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi covid 19;
2. Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi meningkat karena adanya beragam bantuan untuk masyarakat terdampak covid 19. Contohnya yaitu JPS (jaring pengaman sosial) yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Hal ini kemudian turut mengurangi JUMLAH TARGET PMKS yang harus diberi bantuan oleh pemerintah daerah (keterangan ada pada kolom KETERANGAN). Karena PMKS yang diberi bantuan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

meningkat, akhirnya target PMKS yang harus diberi bantuan oleh pemerintah daerah berkurang

3. Berkurangnya target PMKS yang harus diberi bantuan, kemudian di sisi lain MENINGKATNYA jumlah PMKS yang diberi bantuan oleh pemerintah daerah mengakibatkan realisasi dari program ini meningkat hingga 29.14% dari targetnya yaitu 1% saja
4. Kesalahan dalam penyusunan indikator di tahun sebelumnya. Jika merujuk pada output indikator kegiatan maka seharusnya berbunyi JUMLAH, bukan PERSENTASE
5. Adanya kenaikan jumlah korban bencana yang diberi bantuan makan melalui dapur umum dikarenakan beberapa hal, antara lain:
6. Adanya korban pandemi covid yang membutuhkan bantuan pangan selama di isolasi
7. Adanya panitia pengemasan bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak covid 19 yang diberi makanan melalui dapur umum. Proses pengemasan bantuan sosial yang memakan waktu hingga berbulan bulan tentunya mengakibatkan jumlah paket makanan yang dipenuhi melalui dapur umum juga meningkat. Dari yang semua targetnya ditentukan sebanyak 1.000 orang (1 paket 1 orang), meningkat hingga 17.300 orang (1 paket 1 orang).
8. Adanya pembatasan sosial, pengurangan aktifitas
9. Turunnya jumlah KPM PKH disebabkan adanya KPM PKH Graduasi. Kemensos setiap 6 tahun sekali melakukan evaluasi terhadap KPM PKH, yang dapat berakibat pada pengurangan jumlah KPM PKH. Apabila KPM tersebut non-eligible (tidak memenuhi syarat) maka akan dikeluarkan dari daftar KPM PKH.
10. Karena fakir miskin yang terdata dalam DTKS dibantu dan ditangani sesuai program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
11. pelaksanaan melalui daring tidak memungkinkan karena peserta sosialisasi merupakan PMKS.

Solusi :

1. Dirumuskan metode sosialisasi yang memenuhi prokes dan rencana kerja serta akan dilaksanakan pada 2022.
2. Dilaksanakan sinergi intensif dengan potensi potensi penanggulangan bencana yang eksis di masyarakat serta OPD terkait.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya sebagai laporan *progress report* perjalanan pembangunan selama masa jabatan Bupati, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Blitar akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang kita harapkan. Selain itu untuk menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja baik secara manual maupun menggunakan sistem aplikasi, Pemerintah Kabupaten Blitar sangat mengharapkan adanya peningkatan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dalam bentuk :

1. Partisipasi *stakeholders,* antara lain Perangkat Daerah (Dinas, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar yang berkenaan dengan

penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perubahan paradigma aparatur pemerintah daerah untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kami menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan saran maupun kritik konstruktif sehingga dapat menjadi acuan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang.

Bupati Blitar,

ttd

RINI SYARIFAH

BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 188/ 16 /409.06/KPTS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

b. bahwa demi efektivitas dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas unsur terkait ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan sebagimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar ;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar dan mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ;
b. melakukan pembahasan guna penyempurnaan naskah laporan;
c. mengumpulkan data sebagai bahan atau materi laporan;
d. mengolah dan menganalisis data;
e. menyusun draft naskah dan lampiran pendukung laporan;
f. melakukan penyempurnaan naskah laporan untuk disampaikan kepada Pemerintah melalui Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Blitar ;
3. Sdr. Kepala PD di Lingkungan Pemkab. Blitar ;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar
5. Anggota Tim

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/ 16 /409.06/KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BLITAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar
3.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Blitar
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
5.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar 2. Kepala BPKAD Kabupaten Blitar 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar 4. Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar 5. Kepala Bagian Hukum 6. Kepala Bagian Organisasi 7. Kasubag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan
6.	Petugas Pengolah Data	1. Petugas Penyusun LPPD pada Badan/Dinas/Bagian/Unit Kerja 2. Petugas Penyusun LPPD pada Kecamatan 3. Petugas Penyusun LPPD pada Bagian Tata Pemerintahan

BUPATI BLITAR,

RIJANTO